

**“RESISTENSI NELAYAN TERHADAP BIAYA TAMBAT
LABUH KAPAL DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
CILACAP”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun Oleh:

NONI KENSIWI

2006016051

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Noni Kensiwi

NIM : 2006016051

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : "Resistensi Nelayan Terhadap Biaya Tambat Labuh Kapal Di
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap"

Dengan ini saya telah setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaiikum Wr.Wb

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing,



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

RESISTENSI NELAYAN TERHADAP BIAYA TAMBAT LABUH KAPAL DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Disusun Oleh :

Noni Kensiwi

2006016051

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 3 April 2024

dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Mahsun, M.A
NIP 198511182016011901



Sekretaris

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP 198505022019031007

Penguji

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
198409092019031007

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan skripsi ini adalah hasil saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 Maret 2024



NIM. 2006016051

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Resistensi Nelayan terhadap Biaya Tambat Labuh Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baliu Nabi panutan kita pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan Allah SWT dan pihak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat dan materil baik secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof.Dr.Nizar Ali. M.Ag., selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A., dan Muhammad Mahsun, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A., selaku dosen wali saya yang telah memberikan pengarahan, nasihat serta bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.A., selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, semangat, dukungan serta

bimbingannya sampai sejauh ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk memperoleh data.
9. Superhero dan Panutanku, seseorang yang biasa saya sebut bapak. Beliau bapak Marsono Tejo Bandoro, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, walaupun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana.
10. Pintu surgaku, Ibu Suratmi. Perempuan hebat yang sudah membesarkan anak-anaknya dengan kasih dan sayangnya. Selalu senantiasa memberikan doa, cinta, motivasi, dukungan serta semangatnya. Saya persembahkan karya tulis dan gelar sarjana ini untuk mama. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya sehingga saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan mama sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. *Love you more ma.*
11. Kakak penulis, Sasi Suryana. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik bagi penulis. Terimakasih atas dukungan materil dan doa doa baiknya, selama ini.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadhlan, beliau Babah Yai Fadhlolan Musyafa, Lc, M.A. dan Ibu Nyai Fenty Hidayah yang telah mengajarkan ilmu serta tak henti-hentinya memberikan semangat serta doa kepada para santri dalam menggapai cita-cita.
13. Sahabat penulis dari maba sampai sekarang, Rahmalia Dwi Fitriani dan Izzatul Afni yang terus memberikan dukungan, selalu bersedia mendengarkan curahan hati penulis, memberikan semangat serta hal-hal baik lainnya, terimakasih telah kebersamai sampai saat ini.

14. Sahabat penulis sedari kecil sampai sekarang, Fia Ade Triyanti terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi dan waktunya. Terimakasih juga telah bertumbuh kembang bersama dan kebersamaan penulis sampai penulis bisa berada dititik ini.
15. Teman teman terbaik lingkaran "Majelis Jannatul ma'wa" Fiqi Restu Subekti, S.Ag, Hilyatul Ulya Annahariya, Ade Yulia Afwa yang selalu menjadi *moodboster* penulis. Terimakasih untuk selalu memberikan semangat, motivasi, kebahagiaan, siraman rohani dan waktu serta kesempatan yang pernah disempatkan untuk penulis.
16. Teman teman sohib seperjuangan penulis Amelia Ulfa Rosida, Hilya Irbatul Iski, Adisty Mayla Faza, Daimah Khoirunisa terimakasih telah memberikan suport dan dukungannya kepada penulis.
17. Team Adamart Depan Miss Fika dan Mba Yani, terimakasih telah pengayomi penulis seperti adik sendiri. Terimakasih atas kebaikannya, dukungan, motivasi serta doa baik yang diberikan.
18. Semua teman teman Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai hari hari penulis.
19. Teruntuk anggota kamar 5 lantai dua pondok depan, Mba El, Mba Desi, Sofuro, Ummik, Kak Lina, Ummi Zahro, Milatul, Na'ma, terimakasih atas dukungan dan afirmasi positifnya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kalian selalu dikelilingi hal-hal baik.
20. Terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan pernah terlibat dalam proses perjuangan penulis dalam menulis tugas akhir ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
21. *Last but not least* diri saya sendiri Noni Kensiwi. Terimakasih karena telah mampu bertahan dan berjuang sampai detik ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan mereyakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 27 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Noni Kensiwi', with a horizontal line extending to the right and the initials 'KvA' written below it.

Noni Kensiwi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk diri saya sendiri, kedua orang tua saya Bapak Marsono Tejo Bandoro dan Ibu Suratmi yang telah memberikan seluruh perjuangannya baik doa dan dukungan yang senantiasa menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan.

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di masa depan.

MOTTO

*”Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”
(QS An Najm, 53:39)*

*”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS Al Insyirah, 94:5-6)*

*“Lebih baik menangis sekarang karena pedihnya memnuntut ilmu, daripada
menangis dikemudian hari karena penyesalan tanpa ilmu”
(Imam Syafi’i)*

*“Nanti engkau akan paham tentang skenario Allah yang paling indah, disaat
engkau tidak berniat mencari sesuatu. Tetapi Allah justru menghadirkan
anugerah, disaat engkau tidak pernah berpikir untuk mengejar, tetpi Allah
memberikan kemudahan untuk tiba-tiba engkau dapatkan”
(Gus Baha)*

”Gonna fight and don’t stop, until you are pround”

*“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka
ingin tahu hanya bagian *success stories*.
Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri
kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari
ini. Tetap berjuang ya!”*

ABSTRAK

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait biaya tambat labuh kapal di pelabuhan perairan. Kebijakan tersebut tertuang dalam di dalam Lampiran Nomor II Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini dalam penerapannya mendapat perlawanan atau resistensi dari nelayan, salah satunya dari nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) dengan melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi). Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan resistensi terjadi dan kurang optimalnya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap, serta bentuk resistensi nelayan di PPS Cilacap dalam merespon kebijakan biaya tambat labuh kapal.

Peneliti menggunakan teori resistensi yang digagas James C. Scott dalam menjawab permasalahan tersebut di atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan berupa pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer peneliti kumpulkan melalui kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan nelayan, HNSI, dan PPS Cilacap, sedangkan data sekunder peneliti kumpulkan melalui buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan internet. Data setelah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi yang dilakukan nelayan di PPS Cilacap atas kebijakan tersebut di atas, dilatarbelakangi faktor ekonomi nelayan yang relatif rendah, faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi aktivitas melaut nelayan di PPS Cilacap, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan tersebut. Adanya resistensi nelayan terhadap kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap belum optimal, hal ini terlihat dari kurang optimalnya HNSI dalam memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan, serta belum mampu menciptakn lingkungan kerja nelayan yang positif, dan mengadvokasi kebijakan tersebut di atas. Bentuk resistensi yang dilakukan nelayan di PPS Cilacap, selain berupa resistensi

tertutup (transkrip tersembunyi), juga dilakukan secara terbuka (transkrip publik), yaitu berupa audiensi dengan HNSI, dan Pemerintah (dalam hal ini PPS Cilacap), serta melakukan unjuk rasa (demonstrasi) menolak pemberlakuan kebijakan tersebut di atas.

Kata Kunci : Kapal, Tambat Labuh, Nelayan, Resistensi.

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia has established a policy regarding ship mooring fees at water ports. This policy is contained in Attachment Number II to Government Regulation Number 85 of 2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. In its implementation, this policy received resistance from fishermen, one of which was fishermen at the Cilacap Ocean Fisheries Port (PPS Cilacap) by holding demonstrations. This research seeks to answer problems regarding the factors that cause resistance to occur and the lack of optimality of the All Indonesian Fishermen's Association (HNSI) as a forum for fishermen in relating to the power of fishermen in the Cilacap PPS, as well as the form of resistance of fishermen in the Cilacap PPS in responding to the mooring fee policy anchor the ship.

Researchers use the theory of resistance initiated by James C. Scott to answer the problems mentioned above. This research is qualitative research, where the approach used is a case study approach. The type of data used in this research is qualitative data, which comes from primary data and secondary data. The researcher collected primary data through observation, documentation and interviews with fishermen, HNSI and PPS Cilacap, while the researcher collected secondary data through books, journals, theses, laws and regulations and the internet. After collecting the data, it was then analyzed using the data analysis model from Miles and Huberman.

The results of the research show that the resistance made by fishermen at PPS Cilacap to the policy mentioned above is based on the relatively low economic factors of fishermen, weather and climate factors that influence fishermen's fishing activities at PPS Cilacap, as well as the lack of socialization carried out by the government regarding this policy. The existence of fishermen's resistance to this policy shows that HNSI as a forum for fishermen in relations with the power of fishermen in PPS Cilacap is not yet optimal, this can be seen from the lack of optimality of HNSI in fighting for the rights and interests of fishermen, and has not been able to create a positive working environment for fishermen. and advocate for the above policies. The forms of resistance carried out by fishermen at PPS Cilacap, apart from closed resistance (hidden transcripts), are also carried out openly (public transcripts), namely in the form of hearings with HNSI, and

the Government (in this case PPS Cilacap), as well as holding demonstrations (demonstrations). reject the implementation of the above policy.

Keywords : Ship, Mooring, Anchorage, Fisherman, Resistance.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TEORI RESISTENSI.....	22
BAB III	31
GAMBARAN UMUM KABUPATEN CILACAP.....	31
DAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	31

A.	Kabupaten Cilacap	31
1.	Keadaan Geografi dan Iklim	31
2.	Wilayah Administratif.....	34
3.	Penduduk.....	37
B.	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap).....	39
1.	Sejarah Singkat PPS Cilacap.....	39
2.	Visi dan Misi PPS Cilacap	41
3.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi PPS Cilacap	41
BAB IV	41
BENTUK-BENTUK RESISTENSI NELAYAN PELABUHAN PERIKANAN	41
SAMUDERA CILACAP	41
A.	Resistensi Terbuka	41
B.	Resistensi Tertutup.....	51
BAB V	61
FAKTOR PENYEBAB RESISTENSI NELAYAN	61
A.	Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Resistensi.....	64
B.	Peran HNSI DPC Kabupaten Cilacap sebagai Wadah Nelayan dalam Berelasi dengan Kekuasaan	70
C.	Tanggapan Pemerintah Terhadap Nelayan yang Melakukan Perlawanan	74
PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
Daftar Pustaka	79
Lampiran – Lampiran	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	31
Gambar 3. 2.....	40
Gambar 4. 1.....	42
Gambar 4. 2.....	50
Gambar 4. 3.....	52
Gambar 4. 4.....	54
Gambar 5. 1.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	5
Tabel 3. 1.....	32
Tabel 3. 2.....	35
Tabel 3. 3.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya 75 persen adalah lautan. Dari luasnya kawasan pesisir di Indonesia menjadikan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang secara turun temurun diwariskan dari para nenek moyang mereka (Fitriani et al, 2023). Menurut beberapa literatur disebutkan jika nelayan adalah sekelompok masyarakat yang masuk kategori miskin jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya di sektor pertanian, nelayan seperti buruh nelayan dan nelayan tradisional bisa dikategorikan sebagai lapisan sosial termiskin, walaupun tidak dikatakan semua golongan nelayan itu miskin (Retno dan Santiasih, 1993). Sebuah lingkaran kemiskinan bisa digambarkan karena buruh nelayan tidak bisa memenuhi serta meningkatkan kebutuhan alat tangkapnya. Berawal dari hal tersebut pendapatan buruh nelayan tetap rendah dikarenakan hasil tangkapan yang timpang. Dari pendapatan yang rendah menyulitkan mereka untuk mengatur keuangan kebutuhan alat tangkap (Hikmatullah, 2020).

Citra kurangnya kesejahteraan nelayan di Indonesia tergolong ironis, mengingat luas wilayahnya yang cukup luas dibandingkan dengan luas daratannya (Fitriani et al, 2023). Kemiskinan akan selalu menjadi agenda nasional yang akan terus dievaluasi oleh pemerintah. Tidak sedikit kajian yang membahas terkait kehidupan masyarakat miskin dari perkotaan hingga daerah pesisir. Pemerintah tentunya telah melakukan berbagai upaya guna memberantas kemiskinan lewat berbagai kebijakan. Namun, seringkali suatu kebijakan sering menguntungkan satu pihak dan lebih merugikan pihak lain. Seperti apa yang dikatakan Sakaria (2014) jika adanya negara dapat menguatkan (rekapitalisasi) kapital sosial masyarakat, akan tetapi justru menggerus kapital sosial masyarakat (dekapitalisasi). Misalkan dalam hal kebijakan perikanan dan kelautan yang diperuntukan untuk para nelayan terkait kenyamanan dan standarisasi para nelayan dalam menjalankan aktifitas melautnya. Oleh karena itu, mereka cenderung merespon dengan peka terhadap kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka. Salah satu bentuk respon mereka terhadap kebijakan ini adalah dengan menginisiasi gerakan sosial maupun gerakan perlawanan (Irawan, 2022).

Studi oleh Tarrow (2022) menunjukkan bahwa gerakan perlawanan sering kali muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dirasakan merugikan oleh masyarakat, dimana aktor-aktor sosial mengorganisir diri dalam berbagai bentuk aksi kolektif untuk menantang dan merubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, gerakan perlawanan seringkali berkembang sebagai tanggapan terhadap kebijakan yang dirasakan sebagai penindasan, di mana kelompok-kelompok yang terpengaruh mengorganisir aksi demonstratif untuk menantang kebijakan tersebut, menunjukkan pentingnya akses ke sumber daya politik dan dukungan jaringan dalam keberhasilan gerakan tersebut (Tilly, 1978). Respons ini merupakan manifestasi dari ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat nelayan (Scott, 1985, 1990).

Dalam konteks demokrasi modern, perlawanan sosial telah mendapatkan posisi penting sebagai faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan publik (Pathurrahman, 2022). Beberapa penelitian terdahulu yang membahas perlawanan yang timbul sebagai respons terhadap isu-isu seperti konflik, ketidaksetaraan, dominasi, penindasan, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian oleh Kusumah . (2022), Royandi (2019), Fitrianita (2019), Alkhudri . (2018), Pathurrahman ., (2022) mereka memberikan pandangan mendalam mengenai perlawanan nelayan di Indonesia, dengan fokus yang beragam mulai dari proyek ekowisata pembebasan lahan, dinamika konflik dan negosiasi dalam pemanfaatan sumber daya laut, pro kontra pembangunan PLTU, evolusi gerakan sosial dari era kolonial hingga reformasi, sampai gerakan masyarakat nelayan di tingkat desa yang muncul dan berkembang dengan menggunakan konsep struktur kesempatan politik. Penelitian-penelitian ini menekankan keragaman fokus penelitian dan pendekatan perlawanan sosial nelayan yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, isu spesifik, serta dinamika politik dan sosial, yang menunjukkan pentingnya pemahaman kondisi lokal dan penggunaan pendekatan yang sesuai untuk advokasi yang efektif dan berkelanjutan. Secara umum, terdapat persamaan tema antara penelitian-penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada Perlawanan Nelayan dalam konteks respon terhadap kebijakan pemerintah. Namun, penekanan khusus dari penelitian ini terletak pada eksplorasi spekulasi dan bagaimana bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan nelayan yang fokusnya terletak pada isu ekonomi lokal yang spesifik yaitu kebijakan PNBP tambat labuh kapal yang mempengaruhi bagaimana respon nelayan Cilacap melalui perlawanan sosial.

Berikut merupakan konsep dasar teor i:

1. Teori Ekonomi Perilaku

Teori ini menjelaskan bagaimana individu, dalam hal ini nelayan, membuat keputusan ekonomi berdasarkan preferensi mereka sendiri dan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Dalam konteks ini, teori ekonomi perilaku dapat digunakan untuk memahami bagaimana nelayan mengevaluasi biaya tambat labuh kapal dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolaknya berdasarkan pertimbangan ekonomi pribadi mereka.

2. Teori Resistensi

Teori ini mempelajari cara di mana individu atau kelompok menghadapi atau menentang kekuasaan atau kontrol dari pihak lain, dalam hal ini, resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal. Teori resistensi dapat membantu dalam memahami bagaimana nelayan mengorganisir dan mengartikulasikan perlawanan mereka terhadap biaya tambat labuh sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan dan kemandirian mereka.

3. Teori Kepentingan Kelompok

Teori ini menyoroti bagaimana kepentingan kelompok dapat memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks nelayan di Cilacap, teori kepentingan kelompok dapat digunakan untuk memahami bagaimana solidaritas dan identitas kelompok mempengaruhi sikap dan tindakan kolektif terkait dengan biaya tambat labuh kapal.

4. Teori Keterlibatan Masyarakat

Teori ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, teori keterlibatan masyarakat dapat membantu dalam memahami bagaimana partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait biaya tambat labuh kapal dapat memengaruhi tingkat resistensi mereka.

5. Teori Sosial Budaya

Teori ini mempelajari norma, nilai, dan praktik budaya yang memengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks nelayan di Cilacap, teori sosial budaya dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan

praktik budaya memengaruhi persepsi dan respons mereka terhadap biaya tambat labuh kapal.

Kabupaten Cilacap merupakan sebuah daerah yang terletak di pesisir selatan Jawa Tengah. Merupakan salah satu kawasan penting dalam sektor perikanan Indonesia. Sebagai daerah dengan potensi perikanan yang besar, kehidupan masyarakat nelayan di Cilacap tidak dapat dilepaskan dari aktivitas di laut dan pengelolaan sumber daya perikanan. Tercatat ada dua jumlah pelabuhan besar di Kabupaten Cilacap. Salah satunya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan pelabuhan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Letak geografis Pelabuhan Perikanan Samudera berada di Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Pelabuhan perikanan samudera ini merupakan satu-satunya pelabuhan perikanan yang terkenal memiliki potensi sumber daya yang besar. Posisi Pelabuhan perikanan samudera ini cukup strategis, yaitu terletak diantara objek wisata Pantai Teluk Penyus yang umumnya terdapat banyak nelayan yang berlalu lalang mencari ikan dan Benteng Pendem yang merupakan salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Cilacap. Dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera ini membuka peluang masyarakat di sekitarnya untuk mengembangkan ekonomi perikanan di sekitar pelabuhan. Adapun unit pelayanan yang ditawarkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pelayanan Tambat Labuh, Pelayanan Dock, Pelayanan Pengadaan air, Pelayanan Bengkel dan sebagainya. Semua jenis pelayanan tersebut diatur dalam PP No 85 Tahun 2021 yang berlaku pada KKP. Biaya atas jasa tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1**Biaya Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan**

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)
Biaya Jasa Tambat Kapal Perikanan :		
Kapal berukuran >100 GT	Per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ <i>etmal</i>	1.000,00
Kapal berukuran >30 - 100 GT	Per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ <i>etmal</i>	750,00
Kapal berukuran >5 - 30 GT	Per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ <i>etmal</i>	500,00
Biaya Jasa Labuh Kapal Perikanan :		
Kapal berukuran >100 GT	Per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ <i>etmal</i>	750,00
Kapal berukuran >30 - 100 GT	Per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ <i>etmal</i>	500,00
Kapal berukuran >5 - 30 GT	Per kapal per <i>etmal</i>	4.000,00

Sumber : Lampiran PP No.85 Tahun 2021, Nomor II.

Dinamika kebijakan pemerintah kerap terjadi di sektor perikanan, salah satunya adalah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk parkir atau tambat kapal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2021 yang berlaku di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini hadir sebagai regulasi dari PP No 75 Tahun 2015. Kebijakan tersebut memicu respon dari masyarakat nelayan Cilacap di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera yang terdampak kebijakan tersebut, sebagaimana tercermin dalam sejumlah aksi protes dan demonstrasi yang disorot oleh media. Tercatat para nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera telah melakukan aksi perlawanan dan audiensi sebanyak tiga kali dalam rentan waktu bulan Januari sampai Oktober 2023 lalu. Esensi dari demo dan audiensi tersebut adalah menuntut terkait keberatan atas PP No. 85 Tahun 2021. Adapun tarif tambat kapal berdasarkan. Biaya jasa tambat untuk kapal perikanan berdasarkan tabel 1.1, yaitu untuk kapal berukuran >100 *gross tonnage* (GT) per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar seribu rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar tujuh ratus lima

puluh rupiah, dan kapal berukuran >5 - 30 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, sedangkan untuk biaya jasa labuh, yaitu untuk kapal berukuran >100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, dan kapal berukuran >5-30 GT per kapal per *etmal* ditetapkan sebesar empat ribu rupiah.

Masyarakat Nelayan menganggap penerapan tarif tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terlalu membebani, terlebih saat masa peceklil dan cuaca buruk tiba (Utomo, 2024). Tidak hanya itu, para nelayan juga tetap harus membayar tambat labuh apabila kondisi cuaca sedang tidak baik. Aturan tersebut tentunya memberatkan para nelayan, terutama para nelayan yang tergolong menengah kebawah, mereka juga khawatir jika implementasi kebijakan ini berdampak pada kemunduran sektor perikanan dan meningkatnya pengangguran (HNSI, 2023).

Polemik yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kabupaten Cilacap berkaitan dengan dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang menuai kekhawatiran dan ketidakpuasan dari para nelayan. Mereka merasa bahwa peraturan ini dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan mereka yang sangat bergantung pada hasil laut. Salah satu masalah yang muncul adalah beban finansial yang berat akibat pajak dan biaya tambat labuh kapal yang tinggi. Kebijakan yang dulunya biaya tambat labuh kapal dengan patokan per GT sekarang dikalikan ukuran kapal, terlebih masih ada biaya seperti kebersihan yang tarifnya sampai lima puluh ribu rupiah yang memberatkan para nelayan (Azmie, 2023). Para nelayan menginginkan penurunan atas biaya tambat labuh kapal perikanan, atau bahkan pencabutan atas kebijakan tersebut (Wicaksono, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan biaya tambat labuh kapal yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kabupaten Cilacap berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi para nelayan disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi berbagai aspek seperti pendapatan, akses ke sumber daya, dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Studi ini juga mengeksplorasi dan mendokumentasikan berbagai bentuk perlawanan yang diadopsi oleh nelayan sebagai reaksi terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan. Hal ini termasuk mengkaji bagaimana nelayan mengorganisir diri, strategi yang mereka gunakan, dan bagaimana

mereka berkomunikasi dan mengadvokasi kepentingan mereka. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul “Resistensi Nelayan Terhadap Biaya Tambat Labuh Kapal Di Kabupaten Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan penulis teliti adalah :

1. Bagaimana bentuk resistensi nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam merespon kebijakan tarif tambat labuh kapal ?
2. Mengapa resistensi terjadi, apa faktor yang melatarbelakangi resistensi dan kurang optimalnya HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara *holistic* mengenai resistensi nelayan terhadap biaya jasa tambat labuh kapal di PPS Cilacap. Penelitian ini secara khusus juga ditujukan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi resistensi dan kurang optimalnya HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap; dan
2. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk resistensi Nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam merespon Kebijakan tarif tambat labuh kapal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada literatur ilmu politik

Penelitian ini menambah literatur ilmu politik, terutama yang berkaitan dengan studi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana masyarakat, khususnya nelayan, melihat kebijakan pemerintah terkait tarif tambat labuh kapal.

b. Pemahaman mengenai kebijakan publik

Memperdalam pemahaman mengenai mekanisme yang mendasari kebijakan publik, yaitu bagaimana nelayan di PPS Cilacap sebagai sasaran kebijakan, memandang dan melaksanakan kebijakan tersebut

c. Pengembangan mengenai teori perlawanan sosial

Menawarkan perspektif baru mengenai teori perlawanan sosial, dalam hal ini bagaimana perlawanan dari nelayan terbentuk dan berkembang dalam konteks menolak atau mendukung terhadap kebijakan biaya tambal labuh kapal perikanan di PPS Cilacap.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi bagi pemangku kebijakan

Penelitian ini dapat membantu pemangku kebijakan, khususnya mereka yang bekerja di bidang perikanan dan ekonomi kelautan, membuat kebijakan PNPB tambal labuh kapal yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

b. Pemberdayaan nelayan

Program pemberdayaan nelayan dapat dirancang dengan lebih efisien dengan mengetahui bagaimana nelayan berperilaku. Selain itu juga dapat digunakan untuk menginformasikan dan mendorong komunitas nelayan dalam beradvokasi hak-hak mereka terkait kebijakan parkir atau tambat kapal.

c. Referensi bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi panduan atau inspirasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dengan metode atau lingkungan penelitian yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Program pemberdayaan nelayan dapat dirancang dengan lebih efisien dengan mengetahui bagaimana nelayan berperilaku. Selain itu juga dapat digunakan untuk menginformasikan dan mendorong komunitas nelayan dalam beradvokasi hak-hak mereka terkait kebijakan parkir atau tambat kapal.

1. Perlawanan dan kebijakan publik

Penelitian sosial terkait perlawanan sosial dan kebijakan publik telah banyak dilakukan oleh sarjana di Indonesia. Studi mereka mencakup bagaimana

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat dan kelompok tertentu berdampak adanya Gerakan perlawanan yang muncul. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2017) dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk Lampung”. Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja, telah menimbulkan dampak negatif bagi nelayan lokal, mengakibatkan kesulitan dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penelitian ini, yang menganalisis dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut menggunakan teori evaluasi dampak, menemukan bahwa reklamasi belum berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat pesisir, implementasi kebijakan yang tidak tepat, dan kurangnya pembangunan berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Akibatnya, masyarakat pesisir, terutama nelayan, merasa dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan pengawasan, koordinasi yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan reklamasi.

Selanjutnya yaitu penelitian dari Rahmawati & Firman (2018) dengan judul ”Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme”. Studi ini membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta dengan sudut pandang ekofeminisme. Penulis memilih topik ini untuk menyoroti perlunya integrasi ekofeminisme dalam kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan pengembangan laut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dinilai dari sudut pandang ekofeminisme dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kebijakan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan reklamasi belum sepenuhnya mengadopsi perspektif ekofeminisme, terfokus lebih pada aspek ekonomi daripada pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga, (2022) dengan judul “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Pt. Royal Boskalis Atas Penambangan Pasir Laut Di Pesisir Kota Makassar”. Konflik sosial antara masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dan PT. Royal Boskalis terjadi akibat implementasi kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan ini, yang menguntungkan aktivitas tambang pasir laut PT. Royal Boskalis, menimbulkan

kerusakan lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan. Dengan menggunakan teori konflik sosial Lewis Coser, penelitian ini mengungkap bahwa konflik ini bermula dari polarisasi kepentingan, di mana hak-hak nelayan diabaikan sementara PT. Royal Boskalis memperoleh keuntungan signifikan. Kurangnya akses informasi dan partisipasi nelayan dalam pembuatan kebijakan, serta masalah eko-spasial dan lingkungan, menjadi faktor-faktor utama yang memperburuk konflik tersebut.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tahir (2021) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayandi Desa Padaelo”. Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Padaelo, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data dari wawancara dan dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan beberapa inisiatif seperti pembangunan fasilitas perahu, lantai jemur, bantuan budidaya rumput laut, dan dukungan modal usaha. Namun, kendala seperti fluktuasi harga rumput laut dan keterbatasan anggaran menyebabkan hanya sebagian kebijakan yang dapat diimplementasikan. Studi ini mengungkap kesenjangan antara rencana dan realisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Padaelo, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Septyanto (2023) dengan judul ”Peran Friends Of The Earth International (FoEI) Dalam Strategi Advokasi Pada Konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020”. Penelitian tentang konflik tanah di Pulau Pari, Indonesia, menyoroti peran Friends of the Earth International (FoEI), sebuah organisasi non-pemerintah internasional, dalam mengadvokasi masalah ini antara tahun 2017 hingga 2020. Di tengah respons pemerintah pusat yang lemah terhadap kriminalisasi dan intimidasi yang dialami nelayan dan masyarakat lokal selama 40 tahun terkait klaim hak tanah, FoEI terlibat dalam strategi advokasi melalui tekanan langsung dan tidak langsung, pelobi kebijakan, dan pembentukan kebijakan alternatif. Meski berupaya aktif sebagai pemikir, aktor, dan kontributor dalam pembuatan kebijakan, efektivitas FoEI terhambat karena beberapa kegiatannya tidak sepenuhnya selaras dengan strategi advokasi yang direncanakan, termasuk keputusan untuk membiarkan warga melakukan advokasi secara mandiri.

2. Resistensi masyarakat nelayan

Sebuah kebijakan yang tidak memberikan jalan keluar atas adanya permasalahan akan memicu sebuah gerakan perlawanan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2022) dengan judul "Strategi Adaptasi Nelayan Pengembangan Wisata Pantai 9 di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep". Pembangunan Pantai 9 di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, menghasilkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat. Proyek ekowisata ini memicu perlawanan masyarakat terhadap pembebasan lahan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus. Masyarakat Pantai 9 menunjukkan perlawanan melalui politik perlawanan dan pembentukan struktur organisasi untuk menolak pengusuran. Mereka juga menggunakan banner dan slogan sebagai bentuk ekspresi perlawanan. Penelitian ini menganalisis perlawanan masyarakat dengan teori Sidney Tarrow.

Selain itu juga penelitian Royandi (2019) dengan judul "Politik Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut (Studi Relasi Kuasa Antar Kelompok Nelayan Di wilayah PLTU Palabuhanratu)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan sumber daya laut di Palabuhanratu, Sukabumi, dengan fokus pada interaksi kepentingan dan struktur relasi kekuasaan antara berbagai pihak, termasuk nelayan lokal, nelayan pendatang, dan lembaga terkait. Menyelidiki bagaimana relasi kekuasaan ini memengaruhi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, penelitian mengungkapkan konflik dan negosiasi dalam pemanfaatan sumber daya laut, terutama seputar ikan dominan seperti Tuna dan Cakalang. Dalam konteks ini, nelayan pendatang etnis Bugis muncul sebagai aktor kunci, sedangkan lembaga pemerintah seperti PPN Palabuhanratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan memainkan peran penting sebagai penentu konteks. Studi ini juga menyoroti dampak eksternal dari struktur relasi kekuasaan ini, termasuk perubahan dalam ekonomi dan budaya nelayan, serta dampak lingkungan akibat aktivitas PLTU, menandai respon politik nelayan yang berkisar dari protes terbuka hingga tindakan sembunyi-sembunyi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fitrianita (2019) dengan judul "Resistensi Nelayan Dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap". Penelitian ini mengungkap perlawanan nelayan Menganti Kisik, Cilacap terhadap pembangunan PLTU, memfokuskan pada kerugian yang dirasakan dalam aspek sosial, ekonomi, dan

fisik. Menggunakan metode etnografi, penelitian ini menemukan bahwa perlawanan nelayan berakar pada dampak negatif pembangunan terhadap wilayah kerja dan kerusakan lingkungan. Nelayan memilih resistensi tertutup dan kolektif, dengan strategi seperti perbedaan persepsi, polemik kompensasi, dan pembentukan organisasi sosial KUPM Menganti Kisik sebagai wadah perlawanan. Untuk menyelesaikan konflik, nelayan cenderung berkomitmen terhadap pemahaman dan kontrol sosial atas pembangunan PLTU.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Alkhudri . (2018) dengan judul “Metamorfosis Gerakan Sosial di Banten: Dari Romantisme Identitas ke Isu Agraria Lingkungan”. Penelitian ini mengkaji perubahan dalam gerakan sosial di Banten, menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis. Hasilnya mengungkapkan evolusi gerakan sosial dari era kolonial hingga reformasi, dengan perbedaan dalam isu, aktor, dan ideologi. Selama era kolonial hingga awal kemerdekaan (1813-1945), isu gerakan berkisar pada identitas dan ekonomi politik, dengan aktor utama termasuk bangsawan, ulama, dan jawara, berfokus pada pembebasan dari kolonialisme. Pada era Orde Baru (1945-1998), gerakan tersebut dipicu oleh isu ekonomi politik, agraria, dan pendidikan, dengan rakyat, ulama, dan jawara sebagai aktor utama, meski gerakannya cenderung sporadis dan kurang didukung ideologi yang kuat. Selanjutnya, pada era reformasi, fokus gerakan bergeser ke isu agraria dan lingkungan, dengan rakyat, terutama dari NGO lokal, ulama, dan jawara sebagai aktor kunci, menunjukkan gerakan yang lebih terkoordinir, sistemik, dan didorong oleh ideologi keadilan.

Terakhir penelitian dari Pathurrahman ., (2022) dengan judul “Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Nelayan Desa Tabanio, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gerakan masyarakat nelayan di Desa Tabanio muncul dan berkembang dengan menggunakan konsep struktur kesempatan politik. Meskipun konsep ini umumnya lebih sering diterapkan pada skala makro, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tersebut juga relevan dalam kasus gerakan sosial skala mikro di desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terpilih. Hasil penelitian menemukan empat variabel penting dalam gerakan ini, yaitu: akses ke institusi politik, ketidakstabilan dalam konstelasi kekuasaan elit, konflik antar elit, dan dukungan

elit yang berperan dalam menciptakan kesempatan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh sistem politik lokal, tetapi juga oleh interaksi dinamis antara berbagai faktor politik di tingkat desa dan di atasnya. Penelitian ini menekankan pentingnya menemukan momen perlawanan tepat dalam lingkungan politik agar gerakan sosial dapat berkembang dan berhasil.

Penelitian "Perlawanan Nelayan terhadap Biaya Tambat labuh kapal di Kabupaten Cilacap" menampilkan kesamaan dengan studi lain dalam hal fokus pada gerakan perlawanan sebagai respons terhadap kebijakan publik yang merugikan. Hal ini serupa dengan penelitian lain seperti Wahyuni tentang dampak kebijakan reklamasi di Teluk Lampung, Rahmawati & Firman tentang perspektif ekofeminisme pada reklamasi Teluk Jakarta, dan Erlangga . mengenai konflik antara nelayan Pulau Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis. Studi-studi ini menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah, seringkali diimplementasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan lokal, dapat memicu gerakan perlawanan dari komunitas yang terdampak. Di Cilacap, biaya tambat labuh kapal yang dirasa memberatkan menjadi titik konten bagi nelayan, serupa dengan bagaimana isu-isu lingkungan dan ekonomi menjadi pusat konflik dalam studi lain.

Namun, penelitian ini juga menampilkan perbedaan yang signifikan. Fokusnya pada isu spesifik, yaitu biaya tambat labuh kapal, memberikan contoh jelas tentang bagaimana kebijakan yang tampaknya sederhana dapat memiliki dampak sosial yang mendalam, yang berbeda dari isu yang lebih luas seperti reklamasi atau konflik agraria. Konteks geografis dan sosial Cilacap juga membedakan studi ini dari kasus lain. Misalnya, konflik di Sulawesi Selatan melibatkan dinamika kekuasaan yang berbeda dan kebijakan pemerintah yang spesifik, sementara di Cilacap, perlawanan terfokus pada aspek ekonomi kehidupan nelayan. Selain itu, setiap studi menerapkan metodologi yang berbeda, tergantung pada konteks dan fokusnya. Penelitian di Cilacap lebih menekankan analisis kebijakan dan dampak ekonomi, sedangkan studi lain lebih berfokus pada dampak lingkungan yang lebih luas atau aspek sosial.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini, terdapat penjelasan singkat tentang teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis. Teori ini akan digunakan untuk memahami dan menganalisis temuan penelitian serta solusi masalah yang diteliti. Penelitian mengenai "Resistensi Nelayan terhadap Biaya Tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap" mendapat temuan baru ketika dilihat melalui lensa teori gerakan perlawanan James C. Scott. Scott mengabadikan pola kehidupan sehari-hari para petani dan sejarah mereka dalam melakukan perlawanan dari para elit negara dan agen ekonomi. Adapun bentuk-bentuk perlawanan mereka lebih banyak dengan teknik rendah diri, bersembunyi, menghindar sampai menyeret kaki mereka dan pasif (Scott, 1987). Menurut Scott bentuk perlawanan tersebut dinilai kurang efektif, tetapi alasan signifikan mereka untuk tidak melakukannya adalah karena tidak ingin termasuk kedalam golongan pola produksi kapitalis dan akhirnya terjebak dalam relasi kelas (Scott, 1993).

Perlawanan dalam pandangan James Scott yakni terfokus dalam bentuk-bentuk perlawanan yang benar terjadi di kehidupan sehari-hari, Scott mendeskripsikan dengan jelas bentuk perlawanan kaum proletar yang lemah. Mereka tidak memiliki *power* untuk melakukan perlawanan terbuka ternyata memiliki upaya lain guna menghindari intervensi negara dan agen ekonomi. Perlawanan tak jarang kerap kali merupakan sebuah tindakan atas dominasi yang dibentuk oleh para penguasa atau oligarki. Scott (1993) mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk-bentuk resistensi yaitu resistensi terbuka (*public transcript*) adalah bentuk perlawanan yang tersistematis, kolektif, berprinsip seperti protes sosial atau demonstrasi. Yang mana bentuk awal fokus dan tujuannya lebih jelas dan dramatis, yang kemudian dikenalkan dengan artikulasi halus dan tersebar. Kedua, resistensi tertutup (simbolis) merupakan perlawanan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak seperti halnya fitnah, penolakan, gosip dan juga penarikan kembali rasa hormat kepada para elit pemerintah yang berkuasa. Bentuk perlawanan ini banyak digunakan oleh orang yang cenderung tidak memiliki power untuk melakukan perlawanan secara terbuka. Berdasarkan uraian diatas, Scott mendeskripsikan jika suatu resistensi terjadi sebab adanya ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perlawanan dilakukan sebagai alatisasi warga-warga yang teraniaya sebagai wujud pembelaan hak dalam diri mereka. Oleh karena itu, penyebab

masyarakat yang merasa teraniaya kerap menjaga eksistensinya menggunakan cara aksi perlawanan (Scott J, Perlawanan Kaum Tani, 1993).

Teori Scott, yang secara mendalam mengeksplorasi relasi antara kelompok dominan dan subordinat, memberikan kerangka kerja analitis yang tepat untuk memahami konteks sosial dan ekonomi dari perlawanan nelayan di Cilacap. Dalam pandangan Scott, ekonomi moral yang terbentuk dalam masyarakat agraris atau dalam kasus ini, masyarakat nelayan seringkali dihadapkan pada tantangan oleh kebijakan yang dirancang oleh elit modal dan politik. Ekonomi moral yang terbentuk dalam masyarakat agraris atau dalam kasus ini, masyarakat nelayan seringkali dihadapkan pada tantangan oleh kebijakan yang dirancang oleh elit modal dan politik. Dalam konteks Cilacap, biaya tambat labuh kapal yang dipandang sebagai beban ekonomi oleh nelayan mungkin bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi moral yang telah tertanam lama dalam komunitas nelayan. Perlawanan nelayan dapat dilihat sebagai respons langsung terhadap kebijakan yang dirasa merugikan, menindas, dan berpotensi menghancurkan tatanan ekonomi dan sosial yang ada. Scott (1993) mengartikan bagaimana kelompok subordinat seringkali memiliki strategi terselubung dalam menghadapi dominasi, yang mungkin tidak selalu terlihat sebagai bentuk perlawanan terbuka. Dalam penelitian ini, bisa jadi taktik perlawanan nelayan Cilacap termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan pasif hingga aksi demonstratif.

Dalam konteks penelitian ini, bisa jadi biaya tambat labuh kapal tidak hanya dilihat sebagai masalah ekonomi semata, tapi juga sebagai simbol ketidakadilan yang lebih luas yang dialami oleh nelayan. Kenaikan biaya ini mungkin dilihat sebagai upaya lebih lanjut oleh elit politik dan modal untuk mengeksploitasi nelayan, yang telah lama berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, teori Scott menekankan pada pentingnya memahami konteks lokal dalam menganalisis dinamika perlawanan. Hal ini bisa diartikan, dengan mempertimbangkan teori ini, skripsi harus mendalam mengeksplorasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik spesifik di Kabupaten Cilacap. Apa yang mungkin berlaku secara umum dalam teori Scott harus disesuaikan dan ditafsirkan dalam konteks lokal Cilacap, memperhatikan sejarah, budaya, dan dinamika politik daerah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bermaksud data dinyatakan melalui perkataan atau gambar. Penelitian deskriptif, menurut Sugiyono, (2017:10) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menentukan nilai variabel mandiri, yaitu satu atau lebih variabel (independen), tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Sugiyono, (2017:9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti merupakan alat utama dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih signifikan dibandingkan hasil penelitian umum. Penelitian deskriptif berbeda dengan penelitian jenis ini, yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu fenomena di alam atau teknologi manusia.

Penelitian ini terdiri dari dua jenis: penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelitian lapangan. Maksudnya adalah peneliti melakukan penelitian mereka dengan terjun langsung ke objek yang mereka pelajari. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang sedang ditelitinya, seorang peneliti akan berinteraksi dan berpartisipasi secara langsung dalam kelompok masyarakat. Karena penelitian lapangan ini diperoleh secara langsung dari subjek dan narasumber penelitian, datanya dapat lebih akurat dan jelas.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, atau *case study*. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari, menjelaskan, dan memahami suatu kasus dalam lingkungan alami tanpa bantuan dari luar. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang mendalam tentang kelompok orang, institusi, dan sebagainya selama periode waktu tertentu. (Sugiarto, 2015:2). Pendekatan studi kasus berfokus pada satu subjek yang diangkat dan dipelajari secara menyeluruh untuk menyelidiki dasar dari fenomena tersebut. Sehingga hasil penelitian dapat akurat, dalam hal ini, diperlukan analisis menyeluruh terhadap berbagai komponen yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Penulis mengkaji bagaimana bentuk-bentuk resistensi Nelayan di Pelabuhan

Perikanan Samudera Cilacap dalam merespon Kebijakan PNBP tarif tambat labuh kapal.

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut (Tokan, 2016:75) :

- a. Sumber Data Primer: Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul disebut sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer berarti data yang dikumpulkan langsung dari objek yang dimaksud.
- b. Sumber Data Sekunder: Pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber lainnya disebut sebagai sumber data sekunder.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024. Adapun lokasi penelitiannya dilaksanakan di dua lokasi penelitian yaitu :

- a. PPS Cilacap, yang beralamat di Jalan Lingkar Teluk Penyus Nomor 2, Desa Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. HSNI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Karangmulia, Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi relevan yang diperoleh dalam penelitian tentunya diteliti keaslian datanya melalui triangulasi data, sehingga menjamin keaslian informasi tersebut. Penelitian kualitatif menghasilkan hasil atau data jika tidak ada perbedaan antara kenyataan dan laporan peneliti. Jadi, untuk membuktikan kredibilitas penelitian ini diperlukan uji keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan Triangulasi (Sugiyono, 2017:120). Menurut Sugiyono, (2017) Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang sudah ada. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti sebenarnya mengumpulkan data sambil menguji kredibilitas data, yaitu menguji kredibilitas berbagai metode dan sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi tertulis. Berikut penjelasannya :

a. Observasi

Observasi adalah cara sistematis dan disengaja untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang diselidiki. Observasi menunjukkan bahwa metode pengumpulan data ini lebih akurat daripada metode lain, seperti wawancara dan kuesioner. Tidak hanya orang yang melihat hal ini, tetapi juga objek alam lainnya. Dalam buku Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif", metode observasi dibagi menjadi tiga jenis: observasi partisipatif, observasi terstruktur, dan observasi tak terstruktur (Sugiyono, 2017). Tujuan praktis observasi adalah deskripsi yang berfungsi menggambarkan dan menjelaskan indikasi yang ada. Fenomena-fenomena tersebut dijelaskan secara teoritis dan cukup detail untuk memberikan pemahaman yang memadai terhadap penjelasan dan hasilnya.

Salah satu jenis observasi yang dapat digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif (*participatory observation*), yang merupakan teknik pengamatan secara langsung di lapangan di mana peneliti terlibat dengan sasaran kelompok yang menjadi fokus riset baik sebagai pengamat maupun dengan berpartisipasi dalam proses dan juga aktivitas dari kelompok tersebut. Dalam metode ini, peneliti turut andil dalam aspek kehidupan masyarakat yang diamati. Tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam tentang subjek penelitian. Peneliti melihat perilaku sosial individu, seperti gaya hidup, hubungan dengan masyarakat, dll. Yang akan dilakukan di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap karena perlawanan sosial lebih terpusat terjadi di tempat ini.

b. Wawancara

Sugiyono (2017), menggambarkan wawancara sebagai pertemuan antara dua individu atau lebih yang melibatkan diskusi dan pertukaran informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan. Wawancara atau *interview* adalah jenis komunikasi verbal yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Dengan melakukan wawancara, seorang peneliti dapat mendapatkan banyak data tentang opini, perasaan, dan emosi informan sehingga mereka dapat memahami budaya mereka melalui bahasa mereka atau ekspresinya. Pada penelitian ini digunakan wawancara mendalam, atau wawancara mendalam, dimana pewawancara dan informan melakukan wawancara satu sama lain secara langsung, baik dengan pedoman maupun tanpa pedoman. Informan dalam penelitian ini terlibat dalam

aktivitas sosial yang lama. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian secara menyeluruh, rinci, dan mendalam.

Metode wawancara yang digunakan adalah sistematis dan juga terstruktur. Maksudnya adalah peneliti menggunakan standar urutan wawancara dengan membuat serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber atau informan. Ini dilakukan untuk menjaga agar pembicaraan tetap terfokus dan tidak melebar. Dengan cara ini, jika seseorang menjawab pertanyaan yang tidak sesuai konteks, jawaban mereka dapat dikembalikan ke posisi awal. Studi riset yang dilakukan penulis menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan para nelayan golongan menengah kebawah sampai dengan para patronnya , Kepala Badan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan Ketua DPC HNSI Cabang Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa masa lalu, tulisan, atau gambar yang digunakan sebagai dokumentasi. Dokumentasi dapat berfungsi sebagai pelengkap penelitian kualitatif ketika teknik observasi atau wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang perlu dikumpulkan guna mendukung penelitian seperti profil Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dokumen terkait berita-berita tentang perlawanan nelayan, serta proses pengambilan gambar praktek perlawanan nelayan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur hasil observasi, wawancara, dan teknik lainnya agar peneliti dapat memahami dan memberi tahu orang lain tentang hasil penelitian mereka. Data dianalisis sebelum masuk lapangan, selama lapangan, dan pasca masuk lapangan. Menurut Milles dan Huberman, ada tiga alur kegiatan dalam analisis data, yang terdiri dari (Sugiyono, 2017) :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data meliputi Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang dikenal sebagai triangulasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Karena banyaknya data yang dikumpulkan dari lapangan, yang menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan semakin lengkap dan sedikit rumit, penelitian ini

membutuhkan catatan analisis yang cermat dan detail. Setelah mendapatkan data ini, peneliti dapat melakukan analisis dengan menggunakan reduksi data. Jika ditemukan data asing selama pencarian, peneliti dapat mengurangi data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data selesai, data harus ditampilkan. Bagan hubungan antar kategori, uraian singkat, dan metode lainnya dapat digunakan untuk membentuk penyediaan data dalam penelitian kualitatif. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan yang mencakup pertanyaan tentang subjek yang diteliti oleh peneliti, dan didukung dengan bagan dan tabel untuk mempermudah pemahaman peristiwa dan perencanaan tindakan selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah keempat dalam teknis analisis data. Kesimpulan awal hanyalah sementara dan dapat berubah jika ada bukti baru yang mendukung penelitian. Jika ada bukti yang mendukung penelitian pada tahap awal, peneliti akan melanjutkan penelitian hingga mereka dapat menarik kesimpulan yang lebih dapat dipercaya. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dapat berupa hal-hal yang sebelumnya tidak jelas hingga menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika atau penyusunan penulisan didefinisikan sebagai urutan rencana laporan penelitian yang ditulis secara naratif. Dalam sistem penulisan sistematis, ada urutan dan struktur bab dan sub bab yang memperlihatkan realisasi logis dan sistematis. Tujuannya adalah skripsi yang ditulis harus tersusun dengan baik, rapi, dan benar. Sebagai bagian dari Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, berikut merupakan tata urutan yang harus diikuti untuk menyusun skripsi. Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing berisi informasi tentang :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat riset, metode penelitian, tinjauan literatur, dan sistematika penyusunan skripsi. Bagaimana kebijakan PNBP tambat labuh kapal mempengaruhi nelayan sehingga berakibat perlawanan sosial. Perspektif perlawanan sosial nelayan, yang diangkat

penulis, telah dijelaskan dalam uraian di atas. Penulis kemudian membuat dua rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan dan keuntungan riset dibahas dari perspektif teoritis dan praktis. Selain itu peneliti meninjau penelitian sarjana lain untuk memberikan perspektif baru dan menggunakan istilah tinjauan pustaka.

BAB II. TEORI RESISTENSI

Dalam bab kedua, peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian, yaitu teori perlawanan sosial oleh James C. Scott sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian. Kondisi geografis, wilayah administrasi, penduduk, serta produksi perikanan tangkap adalah semua elemen yang membentuk gambaran Kab. Cilacap. Peneliti juga akan memberikan gambaran mengenai PPS Cilacap.

BAB IV. BENTUK-BENTUK RESISTENSI NELAYAN

Bab keempat, berbeda dengan bab keempat yakni membahas mengenai rumusan masalah kedua terkait bentuk-bentuk resistensi Nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam merespon Kebijakan PNBK tarif tambat labuh kapal.

BAB V. FAKTOR PENYEBAB RESISTENSI NELAYAN DAN KURANG OPTIMALNYA HNSI

Bab kelima memberikan solusi untuk rumusan masalah di bab pertama. Dalam hal ini, pertanyaan tentang apa faktor yang melatarbelakangi resistensi dan belum optimalnya HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap.

BAB VI. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi ataupun saran. Kesimpulan merupakan hasil pokok dari penelitian, yang memberikan jawaban teoretis serta empiris. Selain itu, saran atau rekomendasi adalah masukan dari sudut pandang peneliti untuk berbagai pihak, baik pemerintah sampai masyarakat, agar bisa menerapkan kebijakan atau penelitian tambahan berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TEORI RESISTENSI

Teori merupakan hasil penalaran logis terhadap suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap, dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tersebut, dan hasil penalaran tersebut dapat diterima khalayak sebagai suatu disiplin ilmu (Rofiqoh & Zulhawati, 2020). Turner dalam Abubakar (2021), menuturkan bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut :

1. Mengklasifikasi dan mengorganisasi peristiwa-peristiwa di dunia sehingga dapat ditempatkan pada perspektif tertentu;
2. Menjelaskan sebab terjadinya peristiwa mas lampau dan meramalkan kapan, dimana, dan bagaimana peristiwa di masa datang akan terjadi; dan
3. Meramalkan sebuah pengertian secara naluriah, memuskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi.

Abubakar (2021), kemudian menuturkan bahwa teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan terkait dengan resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, adalah teori resistensi yang di gagas oleh James C. Scott.

Kata “resistensi” dalam bahasa Inggris, mengacu pada kata “*resistance*” yang berarti melawan, menentang, serta menunjukkan sikap *defensif* (Nawawi, *et al*, 2016). Persoalan tentang resistensi atau perlawanan sudah ada sejak tahun 1960-an, ketika sejumlah tuntutan terhadap ilmu-ilmu sosial yang dianggap menganut paradigma *positivistik* dan kerap mengecilkan jumlah orang serta tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan mulai mengemuka. Sejumlah rezim totaliter, termasuk rezim adolf Hitler di Jerman, Benoti Mussolini di Italia, dan beberapa

rezim lain di Afrika, berkuasa sepanjang tahun 1960-an. Banyak ilmu-ilmu sosial yang berada dalam bahaya dengan keadaan ini karena harus menghasilkan bukti-bukti yang mendukung suatu rezim. Hal ini mengarah pada munculnya ilmu sosial yang kritis, yang mengkritik baik struktur sistem sosial maupun ideologi yang represif. Sejak akhir tahun 1980-n, para antropolog semakin tertarik pada persoalan resistensi atau perlawanan. Persoalan ini mendapatkan popularitas karena melihat contoh-contoh empiris dan mudah diamati. James C. Scott dalam Joni Rusmanto (2017), berpendapat bahwa :

“Para ahli teori kajian resistensi atau perlawanan tidak terlalu menaruh perhatian pada kajian resistensi atau perlawanan secara umum, dan hanya berkonsentrasi pada konteks keterkaitan antara aksi politik kolektif pada tingkat perlawanan berskala makro yang lebih besar. Namun, unit analisis penting mengenai dinamika kekuasaan dan tindakan politik, baik dari perspektif demokrasi leberal maupun radikal biasanya masih terbatas pada studi aktivitas politik terbuka dan formal, dan hanya berfokus pada peran perlawanan elit dalam kehidupan publik. Ini adalah poin penting yang terkadang diabaikan oleh para ahli teori”.

James C. Scott dalam Joni Rusmanto (2017), kemudian berpendapat bahwa pendekatan studi etnografi interpretatif merupakan sumber berharga bagi para peneliti yang mempelajari resistensi atau perlawanan sosial. Hal ini dapat membantu mereka menyelesaikan survey penelitian yang akan memberikan data yang lebih akurat dan memadai tentang berbagai jenis dinamika resistensi atau perlawanan yang ada di masyarakat. James C. Scott juga mengatakan bahwa perlawanan kaum petani melawan otoritas lahan pertanian di Malaysia menjadi contoh bagaimana sebuah teori harus spesifik secara kontekstual. Perlawanan ini menyebabkan berkembangnya teori resistensi atau perlawanan. (Zainuddin, Sayogyo, & Joebhaar, 2000).

James C. Scott dalam Huda (2020), menguraikan taktik perlawanan yang dilakukan kelompok tertindas dengan sangat kritis. Ia menunjukkan melalui teori resistensi atau perlawanan bahwa kelompok yang lemah, minoritas, atau disominasi tidak pernah sepenuhnya tunduk atau menyerah begitu saja pada keinginan kelompok yang mendominasi, akan tetapi mereka melakukan perlawanan, bahkan ketika menghadapi hegemoni yang ekstrem. Ia juga

mengkritik gagasan Marxis tentang kesadaran palsu dan gagasan Gramscian tentang hegemoni, yang keduanya dianggap mengabaikan adanya perlawanan.

Konsep resistensi atau perlawanan, dalam kajian ilmu-ilmu sosial secara harafiah diartikan sebagai pertentangan terhadap sesuatu. Tindakan perlawanan terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat merupakan penerapan asli dari konsep ini. Konsep yang terkesan konservatif ini mencakup upaya menegakkan dan melestarikan sistem sosial dan budaya yang sudah dikenal masyarakat (Huda, 2020). Meskipun definisi perlawanan tetap sama, gerakan anti kolonialisme mulai menggunakannya secara berbeda pada abad ke-20, bertepatan dengan munculnya kampanye anti kolonialisme di beberapa negara Asia dan Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa fokusnya beralih pada pelestarian dan penghormatan terhadap tradisi budaya asli dibandingkan menerima budaya asing yang sudah tertanam dalam masyarakat (Huda, 2020).

Sumber utama ajaran agama Islam, yaitu al-Quran, telah memberikan arahan dan menjadi landasan terhadap konsep resistensi atau perlawanan sosial. Sejatinnya ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* (SWT) dan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam (SAW), juga akan terwujud dalam sikap dan reaksi seseorang terhadap tantangan hidup. Sikap tersebut antara lain sikap taat terhadap pemimpin, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat (59), yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِئِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Umat Islam dalam memajukan kesejahteraan umum, diperintahkan dengan tegas dalam Surat An-Nisa ayat (59) untuk taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan pemimpin yang memegang kekuasaan. Srifariyati (2019) mengatakan

bahwa umat Islam harus melakukan hal-hal berikut untuk memastikan bahwa hukum dan amanat diterapkan sesempurna dan setara mungkin :

1. Taat dan patuh pada petunjuk Allah SWT dengan mengamalkan ajaran yang terdapat dalam al-Quran, mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, walaupun terkesan memberatkan, serta menahan diri untuk bertindak sesuai dengan kecenderungan dan keinginan diri sendiri;
2. Mengamalkan hikmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang merupakan orang yang menjalankan arahan Allah SWT untuk diikuti seluruh umat-Nya;
3. Hormatilah arahan *ulil amri*, yaitu orang-orang yang mempunyai otoritas di antara mereka. Umat Islam wajib menepati janji yang telah mereka buat, asalkan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Apabila tidak demikian, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, malah kita mempunyai kewajiban untuk menolaknya karena tidak boleh ada seseorang yang mentaati dan menuruti sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap Allah SWT; dan
4. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka permasalahan tersebut perlu dibawa kembali ke al-Quran dan hadis. Perlu dimodifikasi untuk mencerminkan persamaan al-Quran dan hadis.

Arake (2020), menyebutkan bahwa terdapat hadis yang menerangkan tentang kewajiban untuk mentaati pemimpin, diantaranya :

1. Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda : “Akan ada pemerintah yang akan menangani urusanmu setelahku, maka akan menjabat urusanmu orang baik dengan kebajikannya, dan orang jahat dengan kejahatannya, maka dengar dan taatlah kepada mereka selama kebajikan mereka sesuai dengan kebenaran, dan shalatlilah di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu dan untuknya, dan jika mereka berbuat salah, maka salah itu untukmu dan dosanya untuk mereka”;
2. Dari Annawwas bin Sam’an, berkata. Nabi bersabda “Tidak ada ketaatan bagi seseorang yang mendurhakai Tuhan”;

Arake (2020), kemudian menjelaskan tentang makna dan kandungan dari hadis-hadis tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Akan selalu ada beberapa orang yang memimpin dengan buruk dan beberapa orang yang memimpin dengan baik. Selama kebijakan-kebijakan mereka, termasuk

doa memohon dukungan, sejalan dengan kebenaran, kebijakan-kebijakan tersebut tetap perlu didengar dan diikuti. Perbuatan baik mereka bermanfaat bagi semua orang, sedangkan perbuatan mereka menjadi dosa bagi mereka. Mengikuti petunjuk Nabi sama dengan mengikuti petunjuk Allah, sedangkan tidak mentaati perintah Nabi sama dengan tidak mentaati perintah Allah. Oleh karena itu, selama seorang pemimpin tidak mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan prinsip agama Islam, menurut pandangan Islam, mentaati perintah tersebut sama dengan mengikuti Nabi. Lain halnya jika mereka memberikan perintah yang melanggar larangan agama karena tidak akan ditaati. Jika mereka tidak mematuhi, bukan berarti mereka harus memberontak, sebaliknya mereka perlu diajak bicara dengan tenang dan sabar sampai mereka mengubah cara mereka, atau mereka harus dipecat jika tidak ada pilihan lain;

2. Seorang pemimpin yang adil dan cerdas harus mendapat dukungan dan ketaatan rakyatnya, bahkan ketika menghadapi kelompok atau individu yang berusaha menentangnya, misalnya dengan membuat kerusuhan, saling mengadu domba, atau memberontak;

Kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya adalah karena senantiasa menegakkan *amal ma'ruf nahi munkar*, hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat (104), yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Surat Al-Imran ayat (104) memerintah umat Islam untuk menyebarkan ajaran Islam, antara lain tetap berada di jalan kebaikan. Ungkapan “*amar ma'ruf nahi munkar*” mempunyai arti melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan *munkar* (Ali, 2023). Afandi (2022) juga mengatakan bahwa “*amal maruf nahi munkar*” merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk mempraktekannya, harus ada kelompok muslim aktif yang terus menerus mengeluarkan peringatan ketika muncul tanda-tanda perselisihan dan penyimpangan.

Resistensi atau perlawanan menurut James C. Scott mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang didominasi untuk mengurangi atau menyangkal klaim yang dibuat oleh pihak yang dominan (Zainuddin, Sayogyo, & Joebhaar, 2000). James C. Scott dalam bukunya berjudul “*Domination and the Arts of Resistance : Hidden Transcript*”, memperluas gagasan perlawanan di luar lingkungan pertanian dan dunia petani ke dalam lingkup politik yang lebih luas. Dua kelompok masyarakat yang melawan dan ditentang adalah kelompok yang dikendalikan dan kelompok penentang. Untuk menyoroti sifat rahasianya, yang tidak terlihat oleh pemerintah atau kelompok dominan lainnya, gagasan transkrip tersembunyi digunakan sebagai pengganti perlawanan sehari-hari. Transkrip ini tidak untuk dibagikan kepada publik. James C. Scott dalam Huda (2020), juga menyebutkan bahwa kelompok yang didominasi menggunakan 2 (dua) naskah atau transkrip kinerja dalam interaksinya dengan pihak dominan. Transkrip tersebut, adalah :

1. Naskah yang dikenal sebagai transkrip publik mengontrol peran yang dilakukan di depan kelompok dominan, secara metodis membengkokkan ucapan, sikap, dan perilaku agar sesuai dengan keinginan dan standar mereka. Meskipun pihak dominan dipandang kuat (berkuasa), dan sukses, pihak yang didominasi menunjukkan sikap dan perilaku tunduk, patuh dan kalah; dan
2. Naskah yang dikenal sebagai “transkrip tersembunyi” mengatur peran yang dilakukan oleh anggota kelompok yang didominasi sambil menghindari perhatian kelompok yang mendominasi. Tindakan, watak, dan bahasa yang ditampilkan sangat bertolak belakang dengan apa yang tertera dalam transkrip publik. Jika tujuan transkrip publik adalah untuk membangun budaya yang resmi dan dominan, maka tujuan dari transkrip tersembunyi adalah untuk membangun subkultur yang menentang dan memberontak terhadap budaya yang coba diterapkan oleh kelompok dominan (penguasa). Mereka mempunyai tindakan, perkataan, dan gerak tubuh yang mendukung, bertentangan atau menambah apa yang tertulis dalam transkrip publik.

Resistensi atau perlawanan terhadap kelompok yang dominan dapat terlihat dengan membandingkan kedua naskah (transkrip) tersebut di atas. Adanya resistensi atau perlawanan dijelaskan oleh perbedaan nyata antara kata-kata, gerak tubuh, dan perilaku yang ditampilkan sesuai dengan transkrip publik dan yang

ditampilkan sesuai dengan transkrip tersembunyi. Semakin kuat kelompok yang mendominasi merasakan dominasinya, semakin tidak sesuai kehidupan kelompok yang didominasi tersebut dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di antara mereka sendiri (Huda, 2020).

Perlawanan kelompok subdominan disamakan oleh James C. Scott dengan pertentangan seorang editor surat kabar yang tunduk pada pembatasan ketat dari atasannya. Karena posisinya yang tidak menguntungkan, ia harus bertindak sedemikian rupa sehingga ia dapat menyampaikan maksudnya tanpa memberikan kesan bahwa ia melanggar hukum apa pun. Hal ini memerlukan sikap berpikiran terbuka dan kemampuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan segala kesenjangan, ambiguitas, dan tindakan yang ada saat ini. Hal ini memerlukan pertimbangan atas berbagai taktik yang digunakan pihak berwenang untuk menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang (Huda, 2020).

Ada 2 (dua) jenis strategi perlawanan yang dapat diterapkan oleh kelompok subdominan, yaitu menyembunyikan pesan dan menyembunyikan pembawa pesan yang menyampaikannya. Misalnya, seorang budak mungkin mengatakan sesuatu kepada pemiliknya yang “tidak enak di dengar”, tetapi karena pernyataan tersebut tidak jelas, sang majikan tidak dapat menghukum budak tersebut, mungkin budak tersebut yang menyembunyikan identitasnya dapat mengancam tuannya. Selain itu, pesan dan cara penyampaiannya disembunyikan. Misalnya, seorang petani mungkin secara halus menyinggung seseorang yang mempunyai otoritas di suatu perayaan (hajatan). Dalam keadaan tertentu, jika tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan justru menjadi konflik atau bahkan pemberontakan (Huda, 2020). Detailnya, James C. Scott dalam Huda (2020), menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk perlawanan tersembunyi, sebagai berikut

1. Anonimitas (*anonymity*)

Bentuk ini diibaratkan seperti seseorang yang menembak lawan yang tersembunyi. Faktanya, kelompok subdominan sering menyembunyikan identitas aslinya karena takut akan pembalasan dari kelompok dominan. Namun, mereka bisa berkomunikasi sambil menyembunyikan diri. Kelompok subdominan menggunakan berbagai strategi untuk tetap anonim ketika mengkritik dan

menyerang kelompok lain (dominan). Strategi seperti rumor, gosip, kejahatan tersembunyi, penggunaan surat kaleng, dan banyak lagi sering digunakan.

2. Penghalusan ungkapan (*eufemisme*)

Jika pelaku sering menghadapi pembalasan secara diam-diam, terutama jika tindakan tersebut dilakukan terlalu agresif sehingga mudah dilacak, sehingga mengakibatkan kekalahan telak bagi kelompok subdominan, maka masih ada jalan perlawanan lain yang dapat digunakan, yaitu dengan *eufemisme*. Dalam hal *messenger*-nya menjadi objek pertama yang disembunyikan, maka *messege*-nya juga akan menjadi objek tersembunyi. Jika anonimitas dapat berfungsi sebagai perisai terhadap hal-hal vulgar, maka *eufemisme* adalah simbol nuansa bahasa.

3. Menggerutu (*grumbling*)

Bentuk ini adalah keluhan terselubung. *Grumbling* terkadang merupakan upaya untuk mengungkapkan ketidakbahagiaan tanpa harus secara eksplisit dan terang-terangan. Jika dilihat dalam konteks tertentu, hal ini mungkin terlihat jelas bagi pendengarnya, namun dengan mengeluh, pelaku menghindari suatu kejadian, dan jika ditanya, dia mungkin menyangkal alasan di balik keluhannya.

Kelompok subdominan biasanya menggunakan ketiga jenis perlawanan tersembunyi tersebut di atas untuk melawan kelompok dominan. Selain dari ketiga bentuk perlawanan tersebut, masih ada bentuk-bentuk penyelubungan pesan lainnya yang lebih kompleks, bahkan perlawanan dilakukan secara lebih terbuka di ruang publik dengan tetap berpegang pada prinsip kecerdikan dan kehati-hatian dalam menantang transkrip publik. Media budaya biasanya dipilih karena sifatnya yang ambigu, multivalen, dan polisemi, sehingga memungkinkan unsur dari perlawanan dimasukkan dalam media tersebut, sehingga perlawanan dapat lebih tenang dibandingkan konfrontatif.

Apa yang telah diuraikan tersebut di atas, memberikan beberapa pemahaman, Pertama, resistensi tidak harus diwujudkan dalam bentuk aksi kelompok, tindakan individu, impulsif, dan tidak terorganisir dapat diambil sebagai gantinya. Kedua, disebutkan tujuan resistensi adalah menyebabkan pihak lawan melakukan pembalasan. Respon ini bermanifestasi sebagai tindakan yang mengurangi atau menghilangkan segala tekanan yang ada. Ketiga, sebagai komponen integral dari resistensi berbasis kelas, resistensi yang dipertimbangkan terutama terfokus pada

resistensi simbolis atau ideologis, seperti fitnah, isu, penolakan terhadap kategori yang dipaksakan, serta penarikan sikap hormat.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan besaran biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pelaksana kebijakan tersebut, berwenang untuk menerapkan kebijakan tersebut pada masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pada kenyataannya, nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah nelayan tradisional dan merupakan masyarakat miskin. Karena keterbatasan sumber daya dan peralatan dalam melaut, hasil tangkapan ikan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Aktivitas penangkapan ikan mereka juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, dimana ketika cuaca buruk, nelayan tidak dapat melaut. Sekalipun kebijakan yang ada saat ini memberatkan, nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang hanya memahami penangkapan ikan dan memiliki pemahaman terbatas terhadap kebijakan (PP. No.85 Tahun 2021), terpaksa harus mematuhi. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan membuat para nelayan bersikap resisten, meski dalam dosis yang kecil, sehingga peneliti membutuhkan bantuan melalui penjelasan teori resistensi James C. Scott untuk menjelaskan bentuk-bentuk serta faktor penyebab adanya resistensi pada nelayan.

Kajian yang dilakukan oleh Scott, walaupun terfokus pada petani, namun pada kenyataannya, petani dengan nelayan mempunyai status yang sama, yaitu sebagai kelompok yang lemah. Hasilnya, teori resistensi James C. Scott digunakan peneliti dalam mengkarakterisasi resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Resistensi nelayan tersebut, bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu proses yang dapat dipecah menjadi beberapa tahap. Dalam penelitian ini, sangat penting untuk memperoleh data mendalam dari para informan agar dapat mengidentifikasi bentuk serta faktor resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Hasil data tersebut kemudian akan diteliti lebih lanjut hingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN CILACAP

DAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

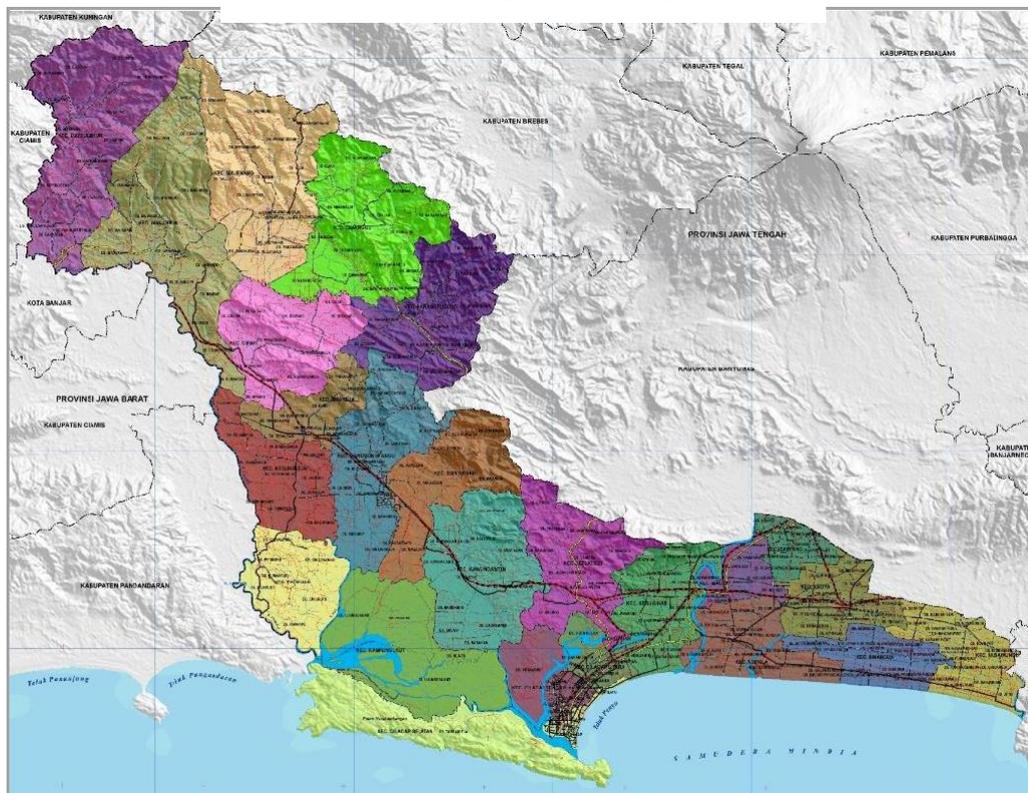
A. Kabupaten Cilacap

1. Keadaan Geografi dan Iklim

Kabupaten Cilacap (Kab. Cilacap) secara astronomis terletak antara $7^{\circ}30'$ dan $7^{\circ}45'20''$ lintang selatan, dan antara $108^{\circ}4'30''$ dan $109^{\circ}30'30''$ bujur timur. Kab. Cilacap secara geografis memiliki batas-batas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.

Gambar 3. 1

Peta Kabupaten Cilacap



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cilacap, 2024.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, yaitu mencapai 6,48% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan terbagi menjadi 24 kecamatan. Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kab. Cilacap

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)
(1)	(2)	(3)
Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	191,73
Wanareja	Wanareja	195,92
Majenang	Jenang	167,60
Cimanggu	Cimanggu	163,35
Karangpucung	Karangpucung	124,74
Cipari	Cipari	107,53
Sidareja	Sidareja	49,31
Kedungreja	Ciklapa	82,01
Patimuan	Patimuan	78,68
Gandrungmangu	Gandrungmangu	119,26
Bantarsari	Bantarsari	99,49
Kawunganten	Kawunganten	

		138,09
Kampung Laut	Klaces	134,07
Jeruklegi	Jeruklegi Wetan	99,41
Kesugihan	Kesugihan Kidul	89,10
Adipala	Adipala	74,65
Maos	Klapagada	34,30
Sampang	Sampang	28,89
Kroya	Kroya	61,68
Binangun	Binangun	53,73
Nusawungu	Nusawungu	66,98
Cilacap Selatan	Sidakaya	8,04
Cilacap Tengah	Gunungsimping	51,00
Cilacap Utara	Gumilir	29,72
Kabupaten Cilacap	Cilacap Tengah	2.249,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2023.

Tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa dari luas wilayah Kab. Cilacap yaitu 2.249,28 km², mencakup 24 kecamatan, dengan luas masing-masing, yaitu Kecamatan Dayeuhluhur seluas 191,73 km², Kecamatan Wanareja seluas 195,92 km², Kecamatan Majenang seluas 167,60 km², Kecamatan Cimanggu seluas 163,35 km², Kecamatan Karangpucung seluas 124,74 km², Kecamatan Cipari seluas 107,53 km², Kecamatan Sidareja seluas 49,31 km², Kecamatan Kedungreja seluas 82,01

km², Kecamatan Patimuan seluas 78,68 km², Kecamatan Gandrungmangu seluas 119,26 km², Kecamatan Bantarsari seluas 99,49 km², Kecamatan Kawunganten seluas 138,09 km², Kecamatan Kampung Laut seluas 134,07 km², Kecamatan Jeruklegi seluas 99,41 km², Kecamatan Kesugihan seluas 89,10 km², Kecamatan Adipala seluas 74,65 km², Kecamatan Maos seluas 34,30 km², Kecamatan Sampang seluas 28,89 km², Kecamatan Kroya seluas 61,68 km², Kecamatan Binangun seluas 53,73 km², Kecamatan Nusawungu seluas 66,98 km², Kecamatan Cilacap Selatan seluas 8,04 km², Kecamatan Cilacap Tengah seluas 51,00 km², dan Kecamatan Cilacap Utara seluas 29,72 km².

Sepanjang tahun 2022, curah hujan terbesar terjadi di bulan November, sementara hari hujan terbanyak terjadi di bulan Desember. Suhu minimum sepanjang tahun 2022 terjadi pada bulan Juli, dan suhu maksimum terjadi pada bulan April. Berikut penulis sajikan tabel mengenai curah hujan dan suhu di Kab. Cilacap.

Curah hujan terbesar di Kab. Cilacap terjadi di bulan November yaitu tercatat 799,6 mm (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma enam milimeter), dengan curah hujan maksimum tercatat 207,00 mm (dua ratus tujuh milimeter), sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Desember, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari. Suhu minimum tahun 2022 terjadi pada bulan Juli, yaitu 21,6⁰C (dua puluh satu koma enam derajat *celcius*), dan suhu maksimum terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 34,2⁰C (tiga puluh empat koma dua derajat *celcius*).

2. Wilayah Administratif

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cilacap dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cilacap dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Pemda), dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas daerah dan lembaga teknis daerah atau sering disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Jumlah OPD di Kab. Cilacap sebanyak 30 (tiga puluh) OPD, dan sebanyak 24 (dua puluh empat) kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat yang membantu pelaksanaan tugas Pemda di tingkat kecamatan. Wilayah Kab. Cilacap yang terdiri dari 24 (dua puluh

empat) kecamatan, terdiri atas 269 (dua ratus enam puluh sembilan) desa dan 15 (lima belas) kelurahan.

Tabel 3. 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kab. Cilacap

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dayeuhluhur	14	14	14	14	14
Wanareja	16	16	16	16	16
Majenang	17	17	17	17	17
Cimanggu	15	15	15	15	15
Karangpucung	14	14	14	14	14
Cipari	11	11	11	11	11
Sidareja	10	10	10	10	10
Kedungreja	11	11	11	11	11
Patimuan	7	7	7	7	7
Gandrungmangu	14	14	14	14	14
Bantarsari	8	8	8	8	8
Kawunganten					

	12	12	12	12	12
Kampung Laut	4	4	4	4	4
Jeruklegi	13	13	13	13	13
Kesugihan	16	16	16	16	16
Adipala	16	16	16	16	16
Maos	10	10	10	10	10
Sampang	10	10	10	10	10
Kroya	17	17	17	17	17
Binangun	17	17	17	17	17
Nusawungu	17	17	17	17	17
Cilacap Selatan	5	5	5	5	5
Cilatap Tengah	5	5	5	5	5
Cilacap Utara	5	5	5	5	5
Kab. Cilacap	2	2	2	2	2
	84	84	84	84	84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Cilacap, 2023.

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah desa atau kelurahan yang ada di Kab. Cilacap tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, adalah sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat), dimana jumlah desa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Majenang, Kecamatan Kroya, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusawungu, masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas desa), sedangkan wilayah yang memiliki

desa atau kelurahan paling sedikit ada di Kecamatan Kampung Laut, yaitu berjumlah 4 (empat) desa.

Sedangkan jumlah RW berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kab. Cilacap sebanyak 10.478 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan), dengan jumlah RT, yaitu sebanyak 2.341 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu). Kecamatan di Kab. Cilacap memiliki jumlah RW terbanyak di wilayah Kecamatan Majenang yaitu 786 (tujuh ratus delapan puluh enam), dan terkecil berada di wilayah Kecamatan Kampung Laut, yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan), sementara jumlah RT terbanyak berada di wilayah Kecamatan Wanareja yaitu 82 (seratus delapan puluh dua), dan yang terkecil di wilayah Kecamatan Kampung Laut, yaitu 39 (tiga puluh sembilan).

3. Penduduk

Penduduk Kab. Cilacap sebanyak 1.988.622 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kab. Cilacap adalah 0,01%. Kepadatan penduduk di 24 (dua puluh empat) kecamatan cukup beragam. Umumnya, wilayah-wilayah (kecamatan di Kab. Cilacap) di wilayah timur dan di sekitar Kota Cilacap mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Kab. Cilacap bagian sebelah barat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2023).

Tabel 3. 3

**Jumlah Penduduk Berdasarkan pada Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kab. Cilacap**

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dayeuhluhur	24.459	24.627	49.086	99
Wanareja	53.659	53.398	107.057	100
Majenang	71.734	70.722	142.456	101
Cimanggu	52.726	51.535	104.261	102
Karangpucung	40.787	39.686	80.473	103

Cipari	34.469	33.578	68.047	103
Sidareja	31.729	31.591	63.320	100
Kedungreja	45.573	44.897	90.470	102
Patimuan	25.292	25.073	50.365	101
Gandrungmangu	56.817	55.248	112.065	103
Bantarsari	38.798	37.925	76.723	102
Kawunganten	43.791	42.771	86.562	102
Kampung Laut	8.279	7.693	15.972	108
Jeruklegi	40.351	39.384	79.735	102
Kesugihan	69.354	68.097	137.451	102
Adipala	48.933	48.124	97.057	102
Maos	23.370	23.518	46.888	99
Sampang	22.194	22.202	44.396	100
Kroya	59.175	58.102	117.277	102
Binangun	35.853	35.184	71.037	102
Nusawungu	44.897	43.846	88.743	102
Cilacap Selatan	42.390	41.548	83.938	102
Cilatap Tengah	45.718	44.945	90.663	102
Cilacap Utara	42.324	42.256	84.580	100
Kab. Cilacap	1.002.672	985.950	1.988.622	102

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Cilacap, 2023.

Jumlah penduduk di Kab. Cilacap adalah 1.988.622 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua) jiwa, dimana penduduk yang berjenis kelamin sebanyak 1.002.672 (satu juta dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) jiwa), dan penduduk berjenis kelamin sebanyak 985.950 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh). Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wanareja, yaitu sebanyak 107.057 (seratus tujuh ribu lima puluh tujuh) jiwa, dan jumlah penduduk terkecil berada di wilayah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sebanyak 15.972 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) jiwa. Sedangkan penduduk jenis kelamin laki-laki terbanyak di Kab. Cilacap berada pada usia 20 sampai 24 tahun, yaitu berjumlah 80.880 (delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh) jiwa, sedangkan untuk penduduk

dengan jenis kelamin perempuan terbanyak ada di usia 30 sampai dengan 34 tahun, yaitu sebanyak 76.209 (tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan) jiwa.

B. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap)

1. Sejarah Singkat PPS Cilacap

Potensi sumber daya ikan yang melimpah di wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta km², dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini mendorong pemerintah untuk membangun pelabuhan perikanan di sejumlah lokasi penting yang strategis, terutama di Kabupaten Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, dengan membangun PPS Cilacap di Desa Tegalkamulyan, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan posisi 09^o01'18,4"BT dan 07^o43'31,2"LS.

Gambar 3. 2

Peta Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



Sumber : Google Maps, 2024.

Rencana pembangunan PPS Cilacap, telah dimulai sekitar Tahun 1980-an, dimana pada waktu itu Direktorat Jenderal Perikanan telah mengembangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sentolo Kawat Cilacap. Rapat koordinasi pada tanggal 14 Agustus 1989, kemudian memutuskan PT. Pertamina yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia pada bidang minyak dan gas sebagai penyedia dana dalam pembangunan PPS Cilacap, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinatornya.

Pembangunan PPS Cilacap dimulai pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dan Wasbang Nomor : KEP.09/M.Ekuin/1990, dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional PPS Cilacap dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan tanggal 24 Mei 1995. Tanggal 18 November 1996, PPS Cilacap diresmikan Presiden Republik Indonesia. Awalnya, status dari PPS Cilacap adalah sebagai pelabuhan perikanan nusantara (Tipe B), hal ini sesuai dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 16 Agustus 1995. Status ini kemudian berubah menjadi pelabuhan perikanan samudera (Tipe A), setelah adanya Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001.

2. Visi dan Misi PPS Cilacap

Visi PPS Cilacap yaitu “Sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu (Ariadi, 2019). Ariadi (2019), kemudian mengatakan bahwa untuk mewujudkan visinya, PPS Cilacap mempunyai misi, menyediakan jasa dan fasilitas yang ditujukan untuk pengembangan usaha perikanan, mengeluarkan jumlah dan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan, memperluas prospek kerja dan usaha, meningkatkan PNBPN, serta membangun lingkungan bisnis yang menguntungkan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi PPS Cilacap

PPS Cilacap berdasarkan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 66/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Cilacap berdasarkan Pasal 8 peraturan ini, bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Pasal 9 dari peraturan ini, juga menyebutkan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *log book* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;

- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitasi usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penangan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV

BENTUK-BENTUK RESISTENSI NELAYAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Pengkajian materi yang akan di bahas dalam Bab V akan menjawab pertanyaan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana bentuk-bentuk resistensi para nelayan di Kabupaten Cilacap (Kab. Cilacap) dalam menanggapi kebijakan tambat labuh kapal. Sejak diberlakukannya kebijakan tambat labuh kapal yang diatur dalam PP No.85 Tahun 2021, para nelayan merasa terbebani atas adanya kebijakan ini. Seiring berjalannya waktu, yaitu pada awal tahun 2023 para nelayan berani menyampaikan pendapat mereka melalui beberapa resistensi atau perlawanan. Hingga sampai akhir tahun 2023 lalu, para nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) masih memperjuangkan dan menyampaikan pendapatnya kepada para pihak, dalam hal instansi pelabuhan. Perlawanan para nelayan di Kab. Cilacap dilakukan 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lamanya, yaitu pada bulan Januari dan November 2023, dengan bentuk resistensi atau perlawanan yang berbeda. Meskipun telah dihadapkan dengan realita realisasi kebijakan tambat labuh tersebut, nelayan masih mengharapkan adanya revisi terhadap kebijakan tersebut. Adanya demonstrasi dan audiensi sewaktu-waktu bisa dilakukan kembali saat kebijakan ini dinilai memberatkan para nelayan. Peneliti menggolongkan ke dalam dua bentuk perlawanan yang dilakukan para nelayan di Kab. Cilacap, yaitu perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup, yang akan di bahas masing-masing bentuk perlawanan tersebut dalam bab ini.

A. Resistensi Terbuka

1. Demonstrasi dan penandatanganan petisi

Pemerintah tentu telah melakukan berbagai upaya guna menyelesaikan masalah melalui berbagai kebijakan. Namun, seringkali suatu kebijakan sering menguntungkan satu pihak dan lebih merugikan pihak lain (Sakaria, 2014). Misalnya dalam hal kebijakan perikanan dan kelautan yang diperuntukkan untuk para nelayan terkait kenyamanan dan standarisasi para nelayan dalam menjalankan aktivitas melautnya. Oleh karena itu, mereka akan merespon dengan peka terhadap kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka. Salah satunya, yaitu dengan sebuah gerakan sosial (Irawan, 2022). Seperti halnya nelayan di PPS

Cilacap yang merespon kebijakan biaya tambat labuh kapal dengan melakukan demonstrasi.

Gambar 4. 1

Aksi Demonstrasi Nelayan Terkait Biaya Tambat Labuh di Depan Kantor PPSC



Sumber: <https://serayunews.com/tolak-pnbp-ribuan-cilacap-nelayan-geruduk-ppsc-dan-dprd>

Adanya kebijakan tarif tambat labuh kapal yang diimplementasikan di PPS Cilacap yang dinilai memberatkan para nelayan, yang kemudian memicu adanya aksi demonstrasi dan penandatanganan petisi. Aksi ini digelar pada bulan Januari 2023. Aksi ini dilakukan oleh para nelayan dan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Cilacap. Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa poin seperti biaya tambat labuh kapal yang terlalu tinggi dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10% pasca produksi. Selain itu, dalam kebijakan ini juga merubah satuan hitung tarif tambat labuh kapal yang awalnya berdasarkan satuan *Gross Tonnage* (GT), sekarang beralih ke ukuran panjang kapal, terlebih masih harus membayar biaya kebersihan.

“Biaya tambat labuh luar biasa terasa bebannya di kami para nelayan. Karena di Kab. Cilacap sendiri hanya terdapat 4 (empat) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, juga adanya biaya PNBP sebesar 10%. Dulu per GT, sekarang permeter dikali ukuran panjang kapal perhari dan belum lagi disuruh

bayar biaya kebersihan sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ini yang menjadi beban kita” (Wawancara, Yugo, 20 Januari 2024).

Beberapa kali aksi resistensi dilakukan oleh para nelayan sepanjang tahun 2023, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil apapun. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi di depan kantor PPS Cilacap dengan membawa *banner* berisi penandatanganan petisi penolakan para nelayan. Dari pihak PPS Cilacap sendiri hanya memberikan keterangan jika akan meneruskan keluhan para nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). Nelayan sebagai kelompok marginal bisa menyampaikan aspirasi, selebihnya mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka. Pasca resistensi para nelayan tetap melanjutkan aktivitasnya. Mau tidak mau mereka harus tetap mencukupi kebutuhan hidupnya dengan melaut (Parjo, 2024).

“Saya harap pemerintah memikirkan ini, dari dulu para nelayan sudah menuntut meminta keringanan terkait hal itu. Untuk beli solar saja susah mba, apalagi tidak melaut berhari-hari” (Wawancara, Yugo, 20 Januari 2024).

Adanya perlawanan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan titik terang serta respon dari PPS Cilacap. Kebijakan ini masih berlaku, yang mana sewaktu-waktu nelayan bisa jadi akan menuntut kembali atas keberatannya terhadap kebijakan tersebut. Mereka mengharapkan adanya penurunan tarif tambat labuh kapal agar lebih murah, bahkan jika bisa dihilangkan. Seperti keterangan yang dikatakan Parjo saat wawancara :

“Sampai saat ini belum ada kabar mba. Peraturannya belum direvisi. Saat ini kan juga pendapatan masih normal, belum nanti saat musim penghujan tiba. Dari kami selalu siap akan membantu dan mengawal setiap aspirasi nelayan” (Wawancara, Parjo, 25 Januari 2024).

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal tidak membuahkan hasil yang diharapkan dapat meliputi:

1. Keterbatasan Pemahaman

Resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di pelabuhan perikanan seringkali merupakan manifestasi dari ketidakpuasan atas peraturan yang dianggap merugikan mereka secara ekonomi dan sosial. Namun, upaya mereka untuk mengubah kebijakan sering kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya, dan salah satu faktor utama adalah keterbatasan pemahaman.

Para nelayan, meskipun memiliki pengalaman langsung dalam industri perikanan, mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diubah. Proses pengambilan keputusan pemerintah seringkali kompleks, melibatkan berbagai aktor dan lembaga, serta prosedur yang rumit. Nelayan, yang terutama fokus pada pekerjaan mereka di laut, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dinamika politik dan administratif yang memengaruhi pembentukan kebijakan. Selain itu, para nelayan mungkin juga kurang memahami mekanisme yang tersedia bagi mereka untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Demonstrasi, petisi, dan upaya advokasi lainnya mungkin tidak dianggap sebagai alat yang efektif atau layak bagi mereka karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut secara efektif. Kurangnya pendidikan formal dan akses terbatas terhadap informasi tentang hak-hak mereka juga dapat memperparah keterbatasan pemahaman ini.

Keterbatasan pemahaman ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi upaya nelayan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang proses politik dan perubahan kebijakan, nelayan mungkin cenderung melakukan tindakan yang kurang terkoordinasi atau tidak efektif. Mereka mungkin tidak mampu memaksimalkan potensi mereka dalam memengaruhi pembuat kebijakan atau membuat argumen yang kuat untuk kasus mereka. Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan advokasi di antara komunitas nelayan. Pelatihan tentang hak-hak mereka, proses politik, dan strategi advokasi dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang cara-cara untuk membuat perubahan yang diinginkan. Organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya dan dukungan teknis untuk membantu nelayan dalam upaya mereka.

Dalam konteks resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal, keterbatasan pemahaman tentang proses politik dan mekanisme perubahan kebijakan dapat menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, penting bagi nelayan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara-cara untuk memengaruhi pembuat kebijakan dan menggunakan alat-alat advokasi yang tersedia. Hanya dengan pemahaman yang lebih baik dan koordinasi yang lebih efektif, nelayan dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam upaya mereka untuk mengubah kebijakan yang memengaruhi mata pencaharian mereka.

2. Ketidaksetujuan Bersama

Ketika membahas resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal, penting untuk mengakui bahwa tidak semua nelayan akan sepakat dengan tindakan demonstrasi dan penandatanganan petisi sebagai bentuk resistensi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masyarakat nelayan, di mana perbedaan pendapat dan kepentingan individual dapat menghambat tercapainya kesatuan aksi dalam memperjuangkan perubahan kebijakan.

Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan ketidaksetujuan bersama adalah adanya perbedaan pendapat dan kepentingan di antara nelayan. Masyarakat nelayan tidaklah homogen; mereka dapat memiliki latar belakang, kebutuhan, dan prioritas yang berbeda-beda. Beberapa nelayan mungkin merasa bahwa kebijakan tambat labuh kapal tidak terlalu memengaruhi mereka secara langsung, atau bahkan mungkin mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan lain mungkin merasa terbebani oleh biaya tambat labuh dan mendukung tindakan protes. Ketidaksetujuan bersama juga dapat disebabkan oleh kurangnya upaya untuk mencapai konsensus dan koordinasi di antara komunitas nelayan. Dalam situasi di mana tidak ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan kolektif, perbedaan pendapat dapat menghambat upaya untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa kesepakatan yang kuat dan strategi yang terkoordinasi, upaya resistensi nelayan dapat menjadi terfragmentasi dan kurang efektif.

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari pihak berwenang atau intervensi dari pihak lain juga dapat mempengaruhi ketidaksetujuan bersama dalam resistensi nelayan. Misalnya, nelayan mungkin menghadapi ancaman atau

janji insentif dari pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan protes. Hal ini dapat menciptakan perpecahan di antara komunitas nelayan dan menghambat upaya untuk mencapai kesatuan dalam memperjuangkan perubahan. Untuk mengatasi ketidaksetujuan bersama, penting untuk mempromosikan dialog terbuka dan inklusif di antara nelayan. Proses dialog yang baik dapat membantu mengidentifikasi perbedaan pendapat dan mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya solidaritas dan kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan bersama juga dapat membantu mengatasi ketidaksetujuan bersama dalam resistensi nelayan.

Ketidaksetujuan bersama merupakan tantangan yang nyata dalam upaya resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, penting bagi komunitas nelayan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan membangun kesatuan dalam tindakan protes mereka. Hanya dengan kesatuan yang solid dan strategi yang terkoordinasi, nelayan dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam memengaruhi perubahan kebijakan yang memengaruhi mata pencaharian mereka. Kebijakan tambat labuh kapal mungkin didukung oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang sulit untuk diubah. Para nelayan mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut, sehingga resistensi mereka tidak cukup kuat untuk mempengaruhi perubahan kebijakan.

3. Keterbatasan Ressource

Dalam perjuangan mereka melawan kebijakan tambat labuh kapal, para nelayan sering kali menghadapi hambatan besar yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. Faktor ini mencakup aspek finansial dan organisasional yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan perlawanan dalam jangka panjang. Keterbatasan ini seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Salah satu keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh nelayan adalah keterbatasan finansial. Proses perlawanan, seperti demonstrasi atau kampanye advokasi, membutuhkan biaya untuk transportasi, pengadaan spanduk atau poster, serta kebutuhan lainnya. Nelayan yang sudah mengalami kesulitan ekonomi akibat kebijakan tambat labuh kapal mungkin tidak mampu untuk mengalokasikan dana tambahan untuk aktivitas perlawanan. Selain itu, mereka juga mungkin

terkendala dalam hal kehilangan pendapatan karena menghabiskan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam aksi protes.

Selain keterbatasan finansial, keterbatasan organisasi juga dapat menjadi hambatan bagi nelayan dalam perlawanan mereka. Beberapa komunitas nelayan mungkin tidak memiliki organisasi atau asosiasi yang kuat yang dapat mendukung mereka dalam upaya perlawanan. Kurangnya struktur organisasi yang efektif dapat membuat koordinasi dan mobilisasi massa menjadi sulit. Tanpa dukungan organisasional yang memadai, nelayan mungkin merasa terisolasi dan tidak mampu untuk menggalang dukungan luas dalam memperjuangkan perubahan kebijakan.

Keterbatasan sumber daya ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan perlawanan nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal. Tanpa dukungan finansial yang cukup dan struktur organisasi yang kuat, perlawanan tersebut mungkin sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nelayan mungkin merasa putus asa atau kehilangan motivasi untuk melanjutkan perlawanan jika mereka terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini, diperlukan dukungan eksternal dari berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba, LSM, dan pemerintah. Dukungan finansial dapat membantu nelayan untuk mengatasi hambatan finansial yang mereka hadapi dalam mempertahankan perlawanan. Selain itu, bantuan teknis dan advokasi dari organisasi-organisasi ini dapat membantu memperkuat struktur organisasi nelayan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam perjuangan politik. Keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun organisasional, merupakan tantangan serius dalam perlawanan nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal. Tanpa dukungan finansial yang memadai dan struktur organisasi yang kuat, perlawanan tersebut mungkin sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan eksternal dan memperkuat solidaritas antara nelayan untuk mengatasi keterbatasan ini dan mencapai perubahan yang diinginkan dalam kebijakan perikanan.

4. Komitmen Pemerintah dan Pelabuhan

Pemerintah dan pihak berwenang di pelabuhan mungkin memiliki komitmen yang kuat terhadap kebijakan tambat labuh kapal, sehingga sulit untuk

mengubah keputusan tersebut meskipun ada resistensi dari para nelayan. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya merespon tuntutan nelayan secara efektif.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, penting bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala potensial yang mungkin menghambat keberhasilan resistensi nelayan, sehingga dapat dilakukan strategi yang lebih efektif dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi nelayan dalam konteks kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Kebijakan publik sering kali menjadi sumber konflik di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Di wilayah perikanan, kebijakan tambat labuh kapal di pelabuhan dapat menjadi titik sengatan bagi para nelayan yang bergantung pada kapal mereka untuk mencari nafkah. Tulisan ini akan mengeksplorasi resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, serta refleksi atas faktor-faktor yang memengaruhi hasil dari resistensi mereka.

Sejak diberlakukannya kebijakan tambat labuh kapal yang diatur dalam PP No.85 Tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, para nelayan merasa terbebani atas adanya kebijakan ini. Biaya tambat labuh kapal memberikan tekanan ekonomi tambahan bagi para nelayan, yang pada gilirannya mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian mereka. Seiring berjalannya waktu, nelayan mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai bentuk resistensi.

Para nelayan di Kabupaten Cilacap menunjukkan ketegasan dalam menanggapi kebijakan tambat labuh kapal dengan berbagai tindakan resistensi, terutama dalam bentuk resistensi terbuka dan tertutup. Salah satu bentuk resistensi terbuka adalah demonstrasi dan penandatanganan petisi. Dalam upaya mempengaruhi kebijakan, nelayan mengorganisir demonstrasi dan mengumpulkan tanda tangan dalam petisi untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap biaya tambat labuh kapal.

Meskipun nelayan telah menunjukkan ketegasan dan keberanian mereka dalam melawan kebijakan yang merugikan, hasil dari resistensi mereka mungkin tidak selalu memuaskan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hasil dari resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Cilacap. Pertama, keterbatasan dampak langsung dari aksi-aksi resistensi terhadap pembuat

kebijakan dapat membuat perubahan sulit tercapai. Kedua, respon dari pemerintah dan pelabuhan terhadap tuntutan nelayan juga dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan resistensi. Ketiga, konsistensi dan kesatuan di antara nelayan dalam melanjutkan perlawanan juga dapat mempengaruhi hasilnya. Keempat, keterlibatan dan dukungan dari masyarakat luas juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari resistensi nelayan. Terakhir, komitmen dan kesediaan untuk terlibat dalam dialog dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat juga akan memengaruhi hasil resistensi.

Resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah cerminan dari perjuangan mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan melindungi keberlangsungan hidup komunitas nelayan. Namun, hasil dari resistensi tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan kebijakan. Melalui refleksi atas hasil dan faktor-faktor yang terlibat, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang cara meningkatkan efektivitas resistensi nelayan di masa depan dan mendukung perjuangan mereka untuk keadilan sosial dan ekonomi.

2. Audiensi

Dalam melakukan perlawanan, audiensi merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para nelayan. Masyarakat memanfaatkan peluang politik dengan melakukan pertemuan dan pengaduan kepada anggota legislatif. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengadukan serta penyerapan aspirasi dari nelayan. Tidak sedikit hal yang diangkat oleh para nelayan kepada DPRD yaitu mengenai tarif tambat labuh kapal, dan rencana implementasi PIT pada tahun 2025 mendatang. Namun, hal yang selalu dikeluhkan dalam kurun waktu beberapa kali audiensi adalah tarif tambat labuh kapal ini, mengingat aduan atau keberatannya yang sudah disampaikan dari awal tahun 2023 yang tidak kunjung mendapatkan respon yang signifikan sampai sekarang.

Gambar 4. 2

Audiensi HNSI Cilacap bersama DPRD Kabupaten Cilacap



Sumber : Dokumentasi HNSI Cilacap, Januari 2023

Dalam konteks perjuangan melawan kebijakan tambat labuh kapal yang dinilai memberatkan, nelayan di sekitar kampung Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap telah menemukan strategi alternatif dalam bentuk audiensi ini. Audiensi menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait biaya tambat labuh kapal serta Perseroan Negara Bukan Pusat (PNBP) sebesar 10% pasca produksi yang diterapkan.

Penting untuk dicatat bahwa para nelayan, yang sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, merasa terbebani dengan kebijakan ini, terutama pada saat musim "paceklik" dan musim penghujan. Saat musim paceklik, hasil tangkapan yang minim tidak sebanding dengan harga solar, sementara pada musim penghujan, cuaca buruk menghambat aktivitas melaut, menyebabkan kapal-kapal tetap berlabuh di dermaga dan menanggung biaya tambat labuh.

Audiensi sebagai bentuk perlawanan dilakukan pada bulan Juli dan November tahun 2023. Dalam audiensi tersebut, perwakilan nelayan maju untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada elit PPS Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap. Namun, meskipun

audiensi dilakukan, pihak PPS Cilacap belum mampu memberikan keterangan yang memadai terkait kebijakan yang diterapkan.

Menariknya, dalam proses audiensi, nelayan juga diwakili oleh beberapa anggota dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap. HNSI Kabupaten Cilacap berperan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan menjadi suara mereka dalam berbagai forum. Dalam hal ini, HNSI juga memberikan arahan kepada nelayan untuk lebih memilih audiensi daripada melakukan aksi demonstrasi. Hal ini dikarenakan audiensi dianggap lebih kondusif dan efektif dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Kali dari kami HNSI ya mba, menghimbau lebih baik audiensi saja dari pada demo. Lebih baik dirundingkan dengan cara yang damai dan tertib” (Wawancara, Parjo, 25 Januari 2024).

Dengan mengadopsi strategi audiensi, para nelayan berusaha memanfaatkan saluran komunikasi formal untuk menyoroiti ketidakadilan yang mereka alami akibat kebijakan yang diterapkan. Meskipun belum ada jaminan bahwa audiensi akan membawa perubahan yang diinginkan, langkah ini menunjukkan komitmen dan ketekunan nelayan dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan terorganisir.

B. Resistensi Tertutup

1. *Ngrasani* atau Gosip

Ngrasani atau gosip tidak bisa dipisahkan dari keadaan sosial lapisan masyarakat, seperti halnya masyarakat nelayan di PPS Cilacap. Gosip adalah sebagai akibat dan upaya perlawanan seperti halnya gerilya guna menegakkan kepentingan-kepentingannya dan orang lain. Gosip merupakan salah satu bentuk perlawanan seperti suara demokratis, saat dalam kondisi yang mana kekuasaan dan penindasan dapat memunculkan aksi dengan tidak adanya rasa hormat. Menggosip dilakukan oleh masyarakat nelayan PPS Cilacap ketika menceritakan atas ketidaksukaannya terhadap kebijakan tambat labuh kapal. Merespon dari hal tersebut, masing-masing masyarakat nelayan di PPS Cilacap saling mengemukakan pendapatnya di muka umum. Saat melakukan interaksi bersama, yang menjadi

topik pembicaraan yaitu mengenai kebijakan-kebijakan yang tidak mereka sukai. Scott berpendapat, jika gosip adalah senjata kaum yang kalah. Gosip termasuk seni perang yang tujuannya menjatuhkan citra tokoh yang menjadi tokoh pembicaraan, seperti halnya apa yang ditemukan oleh peneliti dilapangan :

“Nek kadan ulieh sending peceklik, tesih dibagi-bagi karo liyane. Malahan tesih kon mbayar tambat labuh kapal mbarang berat beraat ...” (Kalo terkadang dapatnya sedang sedikit masa pacleklik, masih dibagiin sama yang lain. Terlebih masih disuruh bayar tarif tambat labuh juga berat beraat ...).

Yang kemudian ditanggapi oleh nelayan lain di dalam forum gosip tersebut :
“Ya kepriwen maning ya kang, pas kae demo bae be urung ana jawaban kepriye terusane ...” (Ya bagaimana ya kang, demo kemarin saja belum ada tanggapan bagaimana lanjutannya) (Observasi, Januari 2024).

Gambar 4. 3

Aktivitas Bincang Nelayan di TPI Pelabuhan



Sumber : Dokumentasi Peneliti, Januari 2024.

Budaya menggosip biasa dilakukan oleh masyarakat nelayan di PPS Cilacap. Mereka kerap membicarakan keluhan mereka atau *unek-unek*-nya saat berinteraksi dengan nelayan lain, misalnya saat bagi hasil upah, *cangkruk* (nongkrong) di tempat pengolahan ikan (TPI), saat melakukan aktivitas bongkar muatan sampai waktu istirahat setelah melaut biasanya mereka melakukan gosip disela-sela aktivitasnya.

2. Pertemuan Inisiatif Para Nelayan

Tidak sedikit pemerintah membuat kebijakan yang dirasa memberatkan para masyarakat, dan tidak sedikit pula diantaranya melakukan upaya perlawanan atas implementasi kebijakan tersebut. Seperti apa yang dilakukan masyarakat nelayan di PPS Cilacap. Mereka melakukan resistensi saat merespon kebijakan yang dinilai memberatkan mereka, dimana bentuk perlawanan yang nampak dilakukan seperti aksi demonstrasi. Sebelum melakukan aksinya mereka melakukan perkumpulan dan pertemuan para nelayan dibawah naungan HNSI Kab. Cilacap.

“Jadi nelayan di sini juga melakukan perkumpulan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah nelayan. Yang ikut seperti anggota HNSI, APKI, dan rukun nelayan. Kalo sudah dirembug nanti dari kita akan menyalurkan masalah nelayan ke dinas-dinas terkait sesuai dengan problem nelayan” (Wawancara, Parjo, 25 Januari 2024).

Gambar 4. 4
Musyawarah Rutin Anggota HNSI Cilacap



Sumber : Dokumentasi HNSI Cilacap, Maret 2023

Pertemuan ini memang diperuntukkan untuk menampung aspirasi dan keluhan nelayan di seluruh Kab. Cilacap. Para nelayan yang masuk anggota HNSI akan melakukan perkumpulan dan penyerapan aspirasi dari para nelayan. Mereka membahas keluhan-keluhan nelayan untuk kemudian dimusyawarahkan bersama guna dicarikan jalan keluar. Tidak hanya para nelayan dan HNSI Kab. Cilacap saja yang mengikuti pertemuan tersebut, tetapi juga diikuti oleh Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (APKI) dan rukun nelayan. Dari perkumpulan ini nanti akan didapatkan problematika dari para nelayan yang kemudian dibahas bersama melalui perkumpulan tersebut yang nantinya akan diajukan melalui dinas terkait. Masalah terkait keberatan tarif tambat labuh juga turut menjadi masalah yang belum terurai, sampai pada akhirnya nelayan berinisiatif untuk melakukan demonstrasi karena keberatan ini tidak kunjung mendapatkan titik temu. Lewat pertemuan ini juga para nelayan mulai mengorganisir perlawanan perlawanan yang akan dilakukan seperti halnya demonstrasi dan audiensi ini. Masyarakat nelayan dalam melakukan upaya aksinya yang sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang mereka

harapkan. Siasat untuk menemui KKP melalui perwakilan nelayan pun ternyata belum cukup untuk bisa mengubah kebijakan ini.

3. Penarikan Rasa Hormat Kepada Pemerintah

Adanya aktivitas menggosip berakibat dengan penarikan rasa hormat kepada para penguasa. Kekecewaan terhadap pemerintah karena respon aspirasi masyarakat nelayan yang belum sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka. Yang mana dari pihak PPS Cilacap belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah ini. Masyarakat nelayan kecewa atas respon dari PPS Cilacap yang tidak kunjung mendapatkan titik temu. Tidak hanya berdiam diri, perwakilan nelayan dan HNSI Kab. Cilacap juga turut memperjuangkan kebijaksanaan terkait hal tersebut dengan mendatangi langsung kantor KKP di Jakarta, akan tetapi sampai dengan saat ini dari pihak KKP hanya memberikan keterangan akan menampung aspirasi dari para nelayan dan belum ditindaklanjuti.

Analisis terhadap penarikan rasa hormat terhadap pemerintah dalam konteks resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya.

1. Keterbatasan Respons Pemerintah

Penarikan rasa hormat terhadap pemerintah oleh nelayan muncul sebagai hasil dari persepsi bahwa respons pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka masih jauh dari memadai. Meskipun nelayan telah secara aktif menyuarakan ketidakpuasan mereka dan mencari solusi melalui perwakilan mereka, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, mereka merasa bahwa tanggapan yang mereka terima tidaklah memuaskan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa nelayan telah berusaha untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi dengan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui saluran resmi yang tersedia. Namun, ketidakjelasan dan ketidaktegasan dari pemerintah dalam menanggapi tuntutan nelayan menimbulkan rasa frustrasi dan kekecewaan di kalangan mereka.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi serta kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan yang merupakan bagian integral dari industri perikanan. Kurangnya respons yang memadai dari pemerintah dapat mengakibatkan penurunan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah di mata masyarakat.

Lebih lanjut, kegagalan pemerintah dalam merespons aspirasi nelayan dengan serius dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak sebagai wakil yang efektif bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat nelayan agar dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

2. Ketidakpastian dan Frustrasi

Penarikan rasa hormat yang dialami oleh masyarakat nelayan sering kali dipicu oleh ketidakpastian dan rasa frustrasi yang timbul akibat kebingungan dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ketika nelayan menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak mendapatkan kejelasan mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasinya, perasaan frustrasi dan kebingungan bisa menjadi semakin kuat.

Dalam konteks kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, nelayan mungkin telah melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan mencari solusi terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan. Namun, ketika mereka tidak melihat kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian masalah, perasaan ketidakpastian dan kekecewaan semakin membesar.

Ketidakpastian ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah atau ketidakjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menanggapi aspirasi nelayan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara

pemerintah dan masyarakat nelayan juga dapat memperkuat perasaan frustrasi dan kebingungan.

Akibatnya, penarikan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah dapat meningkat. Ketika nelayan merasa bahwa pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang memadai atau tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, mereka dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan.

Untuk menghindari penurunan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan responsifitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat nelayan. Dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat nelayan, serta menghindari eskalasi ketegangan dan ketidakpuasan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

3. Pentingnya Komunikasi dan Transparansi

Analisis menyatakan bahwa salah satu faktor yang memperparah penarikan rasa hormat nelayan terhadap pemerintah adalah kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya informasi yang jelas dan terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi tuntutan nelayan dapat mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan dan ketegangan antara kedua belah pihak.

Dalam konteks kasus kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, nelayan mungkin merasa bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai mengenai alasan di balik kebijakan tersebut, atau tidak melakukan dialog yang cukup dengan mereka sebelum menerapkan kebijakan. Kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat kebijakan bagi nelayan dapat memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Ketika nelayan merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau bahwa suara mereka diabaikan, hal ini dapat menghasilkan penarikan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa pemerintah tidak menghargai kontribusi mereka dalam industri perikanan dan tidak memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat nelayan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyelenggaraan forum dialog terbuka antara pemerintah dan nelayan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, serta pembentukan mekanisme partisipasi yang memungkinkan nelayan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan meningkatkan komunikasi dan transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat nelayan. Ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman dan ketidakpercayaan, serta memungkinkan terciptanya solusi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Nelayan

Organisasi nelayan, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap, memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk merespons tuntutan mereka. Dalam konteks kasus kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, organisasi nelayan dapat menjadi wadah bagi nelayan untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif. Melalui koordinasi dan advokasi yang efektif, organisasi nelayan dapat menggalang dukungan dari anggotanya dan memperkuat suara mereka dalam menuntut perubahan.

Namun, penarikan rasa hormat terhadap pemerintah juga dapat menghambat kemampuan organisasi nelayan untuk mencapai tujuan mereka jika tidak ada

tanggapan yang memadai dari pemerintah. Ketika nelayan merasa bahwa pemerintah tidak merespons secara serius terhadap tuntutan mereka, hal ini dapat mengurangi motivasi dan kepercayaan mereka terhadap upaya perjuangan yang dilakukan oleh organisasi mereka. Selain itu, penarikan rasa hormat terhadap pemerintah juga dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota organisasi nelayan, karena beberapa anggota mungkin merasa putus asa dan kecewa dengan kegagalan dalam mencapai perubahan yang diinginkan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penarikan rasa hormat terhadap pemerintah merupakan dampak yang kompleks dari interaksi antara respons pemerintah, ketidakpastian dan frustrasi masyarakat nelayan, komunikasi dan transparansi, serta peran organisasi nelayan dalam proses penyelesaian konflik. Untuk mengatasi penurunan rasa hormat ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan responsif pemerintah, memperbaiki komunikasi dan transparansi, serta memperkuat peran organisasi nelayan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan.

Sebagai langkah awal, pemerintah perlu secara aktif melibatkan organisasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan. Ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin antara pemerintah dan organisasi nelayan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan serta mencari solusi bersama. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang langkah-langkah yang diambil dan alasan di balik kebijakan tertentu.

Di samping itu, organisasi nelayan juga perlu terus memperkuat koordinasi dan advokasi mereka untuk memastikan bahwa suara nelayan didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dapat melibatkan kampanye kesadaran masyarakat, penggalangan dukungan publik, dan upaya diplomasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat nelayan secara keseluruhan, diharapkan penarikan rasa hormat terhadap pemerintah dapat diminimalkan,

sementara kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah pihak dapat ditingkatkan.

BAB V

FAKTOR PENYEBAB RESISTENSI NELAYAN

Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 2021, telah menerbitkan sebuah kebijakan, yaitu PP No.85 Tahun 2021. Aturan ini menggantikan PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada KKP. PP No.85 Tahun 2021 juga merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker). PP No.85 Tahun 2021, mengatur tentang pajak perikanan yang berlaku bagi seluruh pelabuhan perikanan, baik skala kecil (tradisional) maupun skala besar. Pajak tersebut, salah satunya berkaitan dengan jasa tambat labuh bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan, salah satunya di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan pelabuhan perikanan tipe A di pantai selatan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Pelabuhan ini berada di bawah naungan KKP (pemerintah), berfungsi sebagai pelabuhan bagi para nelayan, baik skala kecil maupun skala besar dengan menerapkan kebijakan biaya tambat labuh kapal bagi kapal perikanan, yaitu untuk kapal perikanan berukuran >100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar seribu rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah, dan kapal berukuran >5 - 30 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, sedangkan untuk biaya jasa labuh, yaitu untuk kapal berukuran >100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ *etmal* ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, dan kapal berukuran >5-30 GT per kapal per *etmal* ditetapkan sebesar empat ribu rupiah.

Kebijakan atas biaya tambat labuh bagi kapal perikanan tersebut di atas, kemudian disikapi oleh nelayan, dalam hal ini khususnya nelayan di Desa Tegalkamulyan dengan melakukan perlawanan masif selama penerapan kebijakan tersebut. Thomas Hobbes sebagaimana dikutip Murtianto (2022), berpendapat bahwa : “Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak diragukan lagi diperlukan, hal ini untuk mutlak menjadi pedoman bagi semua warga negara”. Jika pendapat ini dikaitkan dengan perlawanan nelayan Desa

Tegalkamulyan terhadap kebijakan biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, maka pendapat tersebut terlihat tidak tepat.

Kebijakan atas biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, *sebagaimana tertuang dalam Lampiran II PP No.85 Tahun 2021, yang mulai diberlakukan* Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 September 2021, awalnya tidak mendapat perlawanan dari nelayan, namun perlawanan mulai dilakukan oleh nelayan Desa Tegalkamulyan sejak awal tahun 2023, dan semakin masif dilakukan pada akhir tahun 2023, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Slamet (nelayan Desa Tegalkamulyan) pada tanggal 26 Januari 2024, dimana ia menyampaikan keterangan bahwa : “Perlawanan nelayan terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, terjadi pada awal tahun 2023, dan lebih masih dilakukan pada bulan November 2023”. Hasil wawancara dengan Solikhan (nelayan Desa Tegalkamulyan), juga mengatakan bahwa : “Saya pernah mengikuti aksi perlawanan atau unjuk rasa terkait dengan penolakan kebijakan biaya tambat labuh bagi kapal perikanan”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Slamet dan Solikhan di atas, Dwiyanto Kurniawan, selaku Kabid. Operasional dan Kesyahbandaran PPS Cilacap, berdasarkan hasil wawancacara pada tanggal 25 Januari 2024, menyampaikan keterangan bahwa : “Kalau demonstrasi bentuknya hanya menyampaikan aspirasi, dan itu terjadi pada tanggal 3 Januari 2023”. Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap, berdasarkan hasil wawancacara peneliti pada tanggal 25 Januari 2024, kemudian juga menyampaikan keterangan bahwa :

“HNSI juga ikut dalam demonstrasi yang dilakukan nelayan. Intinya, HNSI DPC Kabupaten Cilacap, siap menampung aspirasi para nelayan. Tetapi, mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan para nelayan tersebut, kami kurang sependapat. Baiknya, persoalan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap dibicarakan baik-baik karena demonstrasi dapat mengganggu lingkungan masyarakat”.

Peneliti berpendapat bahwa perlawanan yang dilakukan nelayan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap merupakan pola hidup, yang menurut teori James C. Scott dikenal sebagai prinsip hidup subsisten yang mengedepankan prinsip “dahulukan selamat” atau “*safety first*” pada apa yang dilakukannya. James C. Scott dalam teorinya tersebut mengatakan bahwa :

“Kaum petani lebih mengedepankan “dahulukan selamat” untuk memenuhi kebutuhan dasar dari hidupnya, dalam kondisi yang sulit, dibandingkan menanggung risiko yang berat. Pola hidup subsisten adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas seminimal mungkin, artinya mereka lebih mengutamakan apa yang paling dibutuhkannya pada masa yang sulit menyimpannya (Amelia & Prasetyo, 2023).

Resistensi terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, dilakukan oleh sebagian nelayan dengan bersinggungan pada teori James C. Scott di atas, dan sebagian nelayan lainnya melakukan resistensi dengan alasan yang rasional pula. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada sebagian narasumber, menunjukkan bahwa resistensi nelayan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, terjadi oleh karena pemberlakuan PP No.85 Tahun 2021. Hasil wawancara dengan Dwiyanto Kurniawan selaku Kabid. Operasional dan Kesyahbandaran PPS Cilacap, pada tanggal 25 Januari 2024, mengatakan bahwa : “Nelayan melakukan perlawanan karena adanya penerapan PNBK dari non sumber daya alam, sebagaimana yang di atur dalam PP N0.85 Tahun 2021, salah satunya terkait biaya tambat labuh bagi kapal di pelabuhan”.

Biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, oleh masyarakat nelayan, khususnya nelayan Desa Tegalkamulyan dirasa terlalu memberatkan, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Agung (nelayan Desa Tegalkamulyan), pada tanggal 26 Januari 2024, yang mengatakan bahwa : “Ya jelas kebijakan tersebut memberatkan mbak, apalagi kalau pendapatan lagi sedikit, nelayan tetap harus membayar biaya tersebut. Ya penghasilan nggak seberapa juga... “. Hasil wawancacara dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 Januri 2024, juga mengatakan bahwa :

“Dulu biaya tambat labuh bagi kapal di PPS Cilacap dihitung per GT, satu hari sekitar 2.000,00 (dua riibu rupiah). Dalam aturan yang baru, biaya tersebut dinaikkan, bukan lagi per GT, tetapi dihitung per meter persegi per kapal. Ada audiensi agar biaya tambat labuh kapal dikurangi karena terlalu mahal, sebab jika biaya tersebut tidak di bayar, berakibat nelayah tidak bisa berangkat untuk melaut”.

Nelayan yang melakukan resistensi terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, tetap konsisten sampai dengan saat ini. Para nelayan menolak atas kebijakan tersebut, sehingga pada bab IV ini, peneliti akan membahas mengenai :

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Resistensi

Seperangkat gagasan dan asas yang dikenal sebagai kebijakan berfungsi sebagai aturan dan landasan bagi rencana kerja, gaya kepemimpinan, dan pola perilaku. Ungkapan ini dapat digunakan untuk menggambarkan individu maupun kelompok, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Pada tataran pemerintahan, ungkapan ini disebut juga dengan kebijaksanaan, yaitu dalam hal meningkatkan pelayanan publik. Implementasi dari kebijakan ke dalam sebuah tindakan sangatlah penting, bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Ketika hasil atau bentuk nyata dari implementasi kebijakan terwujud, beserta *output* seperti pemahaman masyarakat dan manfaat yang mempunyai beragam dampak terhadap individu dan kelompok, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan, maka implementasi kebijakan dianggap berhasil.

James C. Scott dalam studinya tentang perlawanan dari kaum petani, mengatakan bahwa hilangnya hak petani atas tanah menyebabkan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa, yaitu berupa harga sewa yang tinggi karena mereka harus membayar pajak. Pemilik lahan skala kecil sering kali bergantung pada kelompok elit pemilik tanah untuk hal-hal, seperti membeli benih, peralatan, transportasi, dan pemasaran, serta kadang-kadang untuk kebutuhan pembiayaan, sehingga meningkatkan utang para petani. Hilangnya hak-hak petani tersebut, sebagai akibat dari perubahan pasar yang dikendalikan kapitalisme. Seperti halnya kaum tani Sedaka di Malaysia, nelayan di Desa Tegalkamulyan juga kehilangan akan hak-haknya dari segi ekonomi dan sosial karena adanya kebijakan biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, sebagaimana diatur dalam PP N0.85 Tahun 2021. Meskipun PPS Cilacap memiliki dalih pembenaran dalam menerapkan kebijakan tersebut, namun pada kenyataannya terdapat resistensi dari nelayan, khususnya nelayan di Desa Tegalkamulyan terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi resistensi nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Analisis faktor-

faktor tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

1. Hilangnya Hak Ekonomi dan Sosial Nelayan

Menurut James C. Scott, hilangnya hak-hak petani atas tanah dapat menyebabkan eksploitasi dan penindasan oleh penguasa. Demikian pula, kebijakan biaya tambat labuh kapal yang memberatkan nelayan dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan hak ekonomi dan sosial mereka. Nelayan di Desa Tegalkamulyan, yang mungkin bergantung pada hasil tangkapan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup, merasa terpinggirkan oleh kebijakan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang memperkuat motivasi nelayan untuk melakukan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

2. Ketergantungan pada Pemilik Kapital

Seperti yang diungkapkan oleh James C. Scott, petani sering kali bergantung pada kelompok elit pemilik tanah untuk berbagai keperluan, termasuk pembelian benih, peralatan, transportasi, dan pemasaran hasil panen. Demikian pula, nelayan mungkin tergantung pada pemilik kapal atau pengusaha perikanan untuk menyediakan fasilitas tambat labuh kapal. Ketergantungan ini menciptakan ketidaksetaraan kekuatan yang membuat nelayan sulit untuk menegosiasikan kondisi yang menguntungkan bagi mereka.

3. Ketidakpuasan atas Dalih Pembenaan Kebijakan

Meskipun PPS Cilacap mungkin memiliki alasan untuk menerapkan kebijakan biaya tambat labuh kapal, nelayan di Desa Tegalkamulyan merasa bahwa dalih pembenaan tersebut tidak memadai untuk mengatasi dampak negatif yang mereka alami. Ketidakpuasan ini mendorong nelayan untuk meragukan integritas dan niat baik pemerintah dalam mengambil kebijakan yang memperhatikan kepentingan mereka.

4. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Realitas Lokal

Kebijakan biaya tambat labuh kapal mungkin dirancang tanpa memperhitungkan kondisi dan kebutuhan spesifik nelayan di Desa Tegalkamulyan. Kesenjangan ini menciptakan ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan secara sentral dan realitas lokal di lapangan. Nelayan merasa bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan konteks lokal mereka, sehingga mereka merasa terpinggirkan dan tidak diakui.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor tersebut, dapat diidentifikasi bahwa resistensi nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap bukanlah hanya masalah permukaan, tetapi mencerminkan ketidakpuasan yang lebih mendalam terhadap ketidakadilan ekonomi, ketidaksetaraan kekuatan, dan kurangnya representasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan nelayan secara menyeluruh.

Berikut kajian yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi dan wawancara dengan narasumber terkait dengan faktor yang melatarbelakangi resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, sebagai berikut :

1. Tingkat Ekonomi Nelayan Di Desa Tegalkamulyan Yang Relatif Rendah

PP No.85 Tahun 2021 yang diberlakukan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 September, menggantikan PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP yang berlaku pada KKP. Terdapat sejumlah perubahan, khususnya terkait dengan biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di pelabuhan, dimana dalam aturan yang baru biaya tambat labuh bagi kapal perikanan dihitung per meter persegi per kapal, sementara dalam aturan sebelum dihitung per GT. Aturan ini dirasa nelayan memberatkan karena ekonomi atau pendapatan dari nelayan, khususnya nelayan di Desa Tegalkamulyan sangat rendah.

Gambar 5.1

Kondisi Lingkungan Masyarakat di Sekitar PPSC



Sumber : Dokumentasi Peneliti, Januari 2024

Hasil wawancara dengan Slamet (nelayan Desa Tegalkamulyan) pada tanggal 25 Januari 2024, memberikan keterangan bahwa : “Kebutuhan keluarga saya satu hari palingan 50-70 ribu mbak, tetapi kan ada kebutuhan lain, seperti membeli solar buat melaut. Itu biasanya kira-kira 9 sampai dengan 10 juta buat seminggu”. Hasil wawancara dengan Solikhan (nelayan Desa Tegalkamulyan) pada tanggal 23 Januari 2024, juga mengatakan bahwa : “Kira-kira yah nek kebutuhan saya pribadi sehari 50 ribu cukup mbak. Paling cuma beli rokok sama bensin. Kalo sama kebutuhan keluarga ya kurang kalo segitu”.

Senada dengan hal tersebut di atas, hasil wawancara dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 Januari 2024, kemudian juga mengatakan bahwa :

“Penghasilan nelayan ya beda-beda. Tergantung nelayan apa. Kalo untuk nelayan yang menggunakan kapal saja, penghasilannya beda tergantung pada ukuran kapalnya. Tetapi, kalau dihitung rata-rata, ya bisa mencapai satu juta tiga ratus ribu perbulan. Penghasilan sedikit (kecil), tetapi tetap harus membayar pajak yang mahal, dan di hitung dari pendapatan kotor”.

Peneliti berpendapat bahwa dengan pendapatan nelayan sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber di atas, maka kebijakan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, jelas memberatkan. Pendapatan nelayan di Desa Tegalkamulyan yang hanya berpenghasilan 50-70 ribu dalam sehari, sangatlah minim dan tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarganya, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan tambat labuh bagi kapal perikanan, yang bisa mencapai 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam sehari.

2. Kondisi cuaca dan iklim di Desa Tegalkamulyan

Resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, juga disebabkan oleh adanya faktor alam (cuaca dan iklim) yang mempengaruhi pada aktivitas melaut nelayan Desa Tegalkamulyan. Cuaca dan iklim yang buruk menyebabkan aktivitas melaut nelayan terhenti, yang pada akhirnya mempengaruhi pada kondisi ekonomi nelayan. Hasil wawancara dengan Agung (nelayan Desa Tegalkamulyan) pada tanggal 26 Januari 2024, mengatakan bahwa : “Penghasilan nelayan, khususnya nelayan Desa Tegalkamulyan, tidak menentu apalagi pada saat musim paceklik, nelayan sama sekali tidak memiliki penghasilan”. Senada dengan Agung, hasil wawancara dengan Slamet (nelayan Desa Tegalkamulyan), juga mengatakan bahwa :

“Kalo saya sehari di musim biasa istilah bukan musim penghujan gitu ya bisa sampai 4 juta rupiah mbak. Tetapi itu masih harus di bagi sama ABK lain yang jumlahnya bisa sampai 30 orang tergantung muata kapal sama alat tangkapnya, belum lagi ada iuran kebersihan. Kalau musim penghujan penghasilan nelayan tidak menentu mbak, dapat ikan saja sudah bersyukur”.

Hasil wawancara dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap, kemudian juga mengatakan bahwa : “Untuk penghasilan nelayan ya macam-macam. Yang penghasilannya tiap hari adalah nelayan kecil yang merupakan nelayan harian, dan biasa penghasilan mereka tidak tetap. Kalau musim ikan, mungkin lumayan banyak yaitu sekitar seratus ribu rupiah, terkadang tidak sampai karena penghasilannya itu ada pembagian dengan pemilik kapal/perahu, dan pengerjaannya pun tidak sendirian, misal bawa tiga orang, berarti dihitung menjadi empat, dan hasilnya pun dibagi-bagi selain di potong biaya operasional

dan atau biaya makan. Berbeda dengan kapal besar, mereka biasanya ada upah harian ditambah dengan bonus jika hasil tangkapannya banyak. Kecuali pada saat ikan banyak, nelayan kecil satu hari bisa mencapai lima ratus ribuan rupiah, lain dengan kapal besar yang keuntungannya bisa mencapai puluhan juta rupiah”.

Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka penghasilan dari nelayan, khususnya nelayan di Desa Tegalkamulyan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim. Ketika kondisi cuaca dan iklim bagus maka penghasilan nelayan dapat dimaksimalkan, akan tetapi jika kondisinya buruk (paceklik), maka penghasilan nelayan menjadi minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi cuaca dan iklim yang buruk tersebut, sangat tidak seimbang dengan kewajiban nelayan terhadap kebijakan tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, dimana mereka tetap harus membayar atas jasa tersebut, sekalipun penghasilan mereka tidak ada, dan jika tidak dibayar berpengaruh pada tidak dapatnya mereka (nelayan) untuk berangkat melaut kembali.

3. Sosialisasi yang kurang efektif

Kebijakan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, sebagaimana di atur dalam PP No.85 Tahun 2021, yang oleh Pemerintah Republik Indonesia diberlakukan pada 19 September 2021, kurang disosialisasikan dengan baik kepada nelayan, khususnya nelayan yang ada di Desa Tegalkamulyan. Para nelayan tidak diberikan pemahaman atau pengertian atas pemberlakuan kebijakan biaya tambat labuh bagi kapal di PPS Cilacap. Hasil wawancara dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari, mengatakan bahwa : “Seharusnya kebijakan terkait biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di pelabuhan, itu ada sosialisasinya sebelum diberlakukan.

Pihak pemerintah, melalui PPS Cilacap selaku pelaksana kebijakan tersebut telah melakukan beberapa kali audiensi dengan para nelayan, dengan maksud untuk memberikan pemahaman atau pengertian pada nelayan terkait kebijakan yang ada, namun tetap saja audiensi yang dilakukan antara PPS Cilacap dengan nelayan, belum memberikan pemahaman atau pengertian pada nelayan. Akibatnya, sampai dengan hari ini, resistensi terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, masih dilakukan secara konsisten oleh nelayan, khususnya nelayan Desa Tegalkamulyan.

Penelitian yang dilakukan oleh James C. Scott menunjukkan bahwa faktor utama dari adanya perlawanan sosial adalah faktor ekonomi. Faktor ini terasah dalam resistensi yang dilakukan oleh nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, juga dapat diketahui bahwa selain dari faktor ekonomi, faktor lainnya yang menyebabkan nelayan melakukan resistensi terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, adalah karena kondisi alam (cuaca dan iklim) di Desa Tegalkamulyan yang mempengaruhi terhadap aktivitas melaut, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada nelayan terkait kebijakan tersebut.

B. Peran HNSI DPC Kabupaten Cilacap sebagai Wadah Nelayan dalam Berelasi dengan Kekuasaan

HNSI DPC Kabupaten Cilacap yang resmi didirikan pada tahun 1995, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh kekuatan perikanan di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini juga termasuk di Desa Tegalkamulyan. Visi dan misi dari HNSI DPC Kabupaten Cilacap adalah memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini nelayan di Kabupaten Cilacap dapat memperoleh kesejahteraan yang baik dan berkeadilan, baik lahir maupun batin, serta membantu pemberdayaan dan pembinaan nelayan. Agenda yang dilakukan oleh HNSI DPC Kabupaten Cilacap, antara lain meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani dari nelayan, serta melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang melindungi kepentingan nelayan.

HNSI DPC Kabupaten Cilacap tidak menampik bahwasannya sampai dengan hari ini, nelayan secara konsisten masih melakukan resistensi terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap. Hasil wawancara dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, mengatakan bahwa : “Pihaknya, juga ikut dalam demonstrasi yang dilakukan nelayan. Istilahnya, mendampingi”. Parjo juga memberikan keterangan bahwa : “HNSI DPC Kabupaten Cilacap menampung aspirasi nelayan dan pemilik kapal, kemudian disampaikan kepada pimpinan pusat HNSI, untuk disampaikan ke KKP”. Parjo kemudian juga memberikan keterangan bahwa :

“Sampai sekarang belum ada perubahan, sedangkan responnya hanya ditampung, apakah responnya itu diolah atau tidak, pihaknya tidak mengetahui. Yang katanya mau diproses, tetapi sampai dengan sekarang belum ada perubahan”.

Hasil wawancara dengan Dwiyanto Kurniawan selaku Kabid. Operasional dan Kesyahbandaran PPS Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, mengatakan bahwa : “HNSI DPC Kabupaten Cilacap telah melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, yaitu menghimpun nelayan di seluruh Kabupaten Cilacap, saya pikir sudah bagus berkontribusi dalam setiap kerja”. Namun, peneliti kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dwiyanto Kurniawan, karena apa yang dilakukan oleh HNSI DPC Kabupaten Cilacap belum optimal.

HNSI DPC Kabupaten Cilacap seharusnya mampu memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan di Kabupaten Cilacap, agar nelayan di Kabupaten Cilacap mendapat kesejahteraan yang baik, baik secara fisik maupun rohani. Dengan masih adanya resistensi yang dilakukan nelayan terhadap biaya tambat labuh bagi kapal perikanan di PPS Cilacap, menunjukkan bahwa HNSI belum mampu menciptakan lingkungan kerja nelayan yang positif dan mengadvokasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dari nelayan. HNSI diharapkan lebih aktif lagi dalam mencermari persoalan yang dihadapi para nelayan, sehingga menurut peneliti HNSI tidak cukup hanya dengan menerima dan menyampaikan aspirasi dari nelayan saja.

Alfa dan Kinanda dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Literatur Resistensi dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan serta Usulan Strategi dalam Menghadapi Resistensi Kebijakan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”, berpendapat bahwa resistensi, selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif adalah keterlibatan masyarakat yang lebih baik, lebih banyak sosialisasi dan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan, perbaikan kebijakan pembangunan sebagai respon atas seruan perbaikan kebijakan, dan peningkatan perlindungan sektor sosial, dan lingkungan hidup dari kebijakan yang tidak menguntungkan, sedangkan dampak negatif adalah adanya konflik, berupa kekerasan, perusakan harta benda, permusuhan, bahkan korban jiwa, memuruknya hubungan antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan, serta keterlambatan atau pembatalan kebijakan secara langsung.

Resistensi nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, juga menimbulkan beberapa dampak, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif terlihat dengan terbangunnya komunikasi nelayan, baik dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), maupun dengan pemerintah (dalam hal ini PPS Cilacap selaku pelaksana kebijakan biaya tambat labuh kapal), baik melalui audiensi maupun aksi unjuk rasa (demonstrasi). Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, mengatakan bahwa “Kekurangpuasan dari nelayan serta pemilik kapal, kita himpun di HNSI, menampung keluhannya apa untuk kemudian diajukan ke pemerinah agar kebijakan yang ada dirubah”. Hal serupa juga disampaikan Dwiyanto Kurniawan, selaku Kepala Bidang Operasional dan Kesyahbandaran PPS Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, yang mengatakan bahwa:

“Penyampaian aspirasi kita dengar, dan kemudian disesuaikan dengan kewenangan, untuk kemudian disampaikan ke atas. Kita hanya pelaksana teknis saja. Aspirasi dari mereka seringkali disampaikan melalui media sosial karena kita ada grup *Whatsapp* (Wa), dan konsultasi publik, kalau tidak mereka datang langsung ke sini”.

Keterangan dari Parjo maupun Dwiyanto Kurniawan tersebut, menunjukkan dampak positif dari adanya resistensi nelayan, dimana adanya peningkatan komunikasi yang dilakukan para nelayan melalui audiensi (musyawarah), baik dengan HNSI dan PPS Cilacap. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Dwiyanto Kurniawan selaku Kepala Bidang Operasional dan Kesyahbandaran PPS Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, diperoleh keterangan bahwa demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi terjadi pada tanggal 3 Januari 2023. Hal senada juga disampaikan oleh Parjo selaku Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, yang mengatakan bahwa : “Kalo dari kami HNSI, ya pas kemaren juga ikut demo. Istilahnya mendampingi gitu. Pokoknya kami siap menampung aspirasi para nelayan mbak”. Hasil wawancara dengan Slamet (nelayan) pada tanggal 26 Januari 2024, yang mengatakan bahwa “Iya ada mbak, dulu itu pas awal tahun 2023. Terus kemarin November ada juga demo mbak”. Hal senada juga disampaikan oleh Solikhan (nelayan) pada tanggal 23 Januari 2024, yang mengatakan bahwa “iya ikut mbak pas besar-besare itu, sampe pake trek. Tapi kalo yang kemaren nggak”. Wawan (nelayan)

pada tanggal 26 Januari 2024, juga menyampaikan keterangan bahwa : “Sejauh ini palingan ya demo”.

Keterangan yang disampaikan oleh Dwiyanto Kurniawan, Parjo, Slamet, Wawan, dan Solikhan, memperlihatkan bahwa komunikasi yang terjadi bukan hanya dilakukan melalui audiensi saja, tetapi juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa. Aksi ini dalam pandangan James C. Scott merupakan strategi perlawanan dengan menggunakan naskah atau transkrip publik. Sementara dalam ajaran Islam perlawanan lebih merupakan menasehati kepada pimpinan (dalam hal ini perumus kebijakan tersebut) pada saat melakukan penyimpangan atau kesewenang-wenangan dalam merumuskan kebijakan, sebagaimana ungkapan yang harus dijunjung tinggi yakni “*amal ma'ruf nahi mungkar*”, sebagaimana tertuang dalam al-Quran Surat Al-Imran ayat (104). Islam mengajarkan bahwa upaya menasehati tersebut harus dilakukan dengan penuh sabar, sehingga peneliti berpendapat kedepan para nelayan agar lebih sabar dalam menyipaki kebijakan yang ada, dan tidak melakukan aksi unjuk rasa yang dapat merugikan atau mengganggu kepentingan umum.

Dampak negatif juga terjadi dengan adanya resistensi nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, salah satunya memburuknya hubungan antara PPS Cilacap dengan para nelayan, serta tidak adanya perubahan terkait kebijakan yang ada. Memburuknya hubungan antara PPS Cilacap dengan para nelayan terlihat dari keterangan yang disampaikan Dwiyanto Kurniawan pada tanggal 25 Januari 2024, yang mengatakan bahwa : “kalo menurut saya ya lebih baik audiensi saja daripada demo. Kan bisa diselesaikan dan disampaikan baik-baik dengan kepala dingin”. Peneliti berpendapat bahwa aksi unjuk rasa para (demonstrasi) yang dilakukan para nelayan, jika mengacu pada teori resistensi James C. Scott, adalah salah satu strategi dalam melakukan perlawanan, dimana James C. Scott mengatakan strategi perlawanan, selain dapat menggunakan transkrip tersembunyi, juga dapat menggunakan transkrip publik, salah satunya berupa aksi unjuk rasa (demonstrasi). Namun, jika mengacu pada konsep ajaran Islam, tentunya persoalan-persoalan terkait dengan ketidaksepahaman atas kebijakan biaya tambat labuh kapal, diselesaikan dengan kepala dingin artinya aspirasi disampaikan dengan penuh kesabaran jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Dampak negatif berikutnya adalah aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan tidak diindahkan oleh pemerintah (dalam hal ini perumus kebijakan), dimana sampai dengan saat ini, kebijakan yang ada masih tetap berlaku dan belum ada perubahan, hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan Parjo Wakil Ketua I HNSI DPC Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari 2024, yang mengatakan bahwa : “Aspirasi nelayan yang sudah ditampung dan diajukan untuk dirubah, dalam realisasinya agak tersendat-sendat sampai sekarang, sehingga nelayan merasa kurang puas dan membentuk suatu kesepakatan bersama, yaitu mengumpulkan anggota sebanyak 200 orang mengajukan audiensi meminta supaya kebijakan dirubah, pergi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan membuat laporan ke pihak Kepolisian untuk izin demonstrasi dan pengawalan”. Peneliti mempunyai kekhawatiran bahwasannya jika pemerintah (perumus kebijakan) kurang respon terhadap aspirasi para nelayan tersebut, akan dapat memicu aksi yang lebih besar lagi dari para nelayan. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya lebih serius dalam menanggapi aspirasi tersebut.

C. Tanggapan Pemerintah Terhadap Nelayan yang Melakukan Perlawanan

Pelabuhan perikanan samudera Cilacap tidak menentang dengan adanya perlawanan yang dilakukan nelayan setempat. Mereka menanggapi dan menerima perlawanan yang terjadi. Pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap hanya merespon tindakan yang dilakukan nelayan dengan menerima aspirasi serta keluh kesah nelayan dengan seksama. Hal ini mengingat juga pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan badan yang berdiri dibawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang tugasnya hanya menjalankan tupoksi serta menegakkan peraturan yang ada. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Kepala Kesyahbandaran “Disisni kami sebagai badan dibawah KKP Kementrian Kelautan dan Perikanan hanya bisa menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh badan atasan” ucap Dwiyanto. Ia juga menyatakan jika adanya perlawanan tersebut merupakan hal yang wajar sehingga Pelabuhan Perikanan Samudera hanya memberikan sikap menampungnya untuk kemudian meneruskan ke elit yang lebih tinggi. Ia juga mengatakan jika demonstrasi yang dilakukan nelayan masih dalam batas wajar, selagi tidak melakukan kegaduhan dan kericuhan yang merugikan pihak lain (Wawancara, Dwiyanto, 25 Januari 2024). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlawanan perlawanan yang dilakukan nelayan sekitar pelabuhan

masih dalam hal wajar, mereka hanya merespon adanya keberatan terhadap suatu kebijakan yang berdampak pada aspek ekonomi mereka.

Dalam aspek faktor yang mempengaruhi kebijakan yang diungkapkan oleh George C.Edward yangmana implemnatasi dipengaruhi oleh 4 aspek dimana salah satu faktor belum optimalnya penegakan kebijakan terkait tambat labuh di pelabuhan perikanan Cilacap dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak PPSC dengan nelayan setempat. Begitupun dengan pelaksana kebijakan jika pelaksana kebijakan memiliki tabiat yang kurang mengenakan, maka akan berpengaruh terhadap jalannya kebijakan yang dilaksanakan yaitu kurang berjalan dengan baik.

Tanggapan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sejauh ini hanya sebatas meneima aspirasi terkait kebijakan tambat labuh kapal. Pihak PPSC sendiri belum bisa menjamin apakah kebijakan ini bisa diturunkan atau mungkin ditiadakan. Mengingat untuk merubah suatu kebijakan yang sudah menjadi peraturan undang-undang bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Beda dengan jika para nelayan mengeuhkan hal yang lain, mungkin dari pihak PPSC sendiri bisa mengusakan dan mencari jalan keluar atas suatu masalah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Resistensi yang dilakukan nelayan di PPS Cilacap terjadi karena pemberlakuan kebijakan biaya tambat labuh kapal, sebagaimana yang di atur dalam PP No.85 Tahun 2021. Resistensi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan nelayan yang relatif rendah, cuaca dan iklim di Kab. Cilacap yang mempengaruhi aktivitas melaut (pendapatan), apalagi di saat musim paceklik, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut. Tuntutan para nelayan yang sampai dengan saat ini masih belum membuahkan hasil, menunjukkan bahwa HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap belum optimal. HNSI kurang optimal dalam memperjuangkan hak-hak para nelayan, salah satunya hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik, serta HNSI kurang mengadvokasi terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan para nelayan.
2. Resistensi yang dilakukan para nelayan terhadap kebijakan biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, meliputi resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Resistensi terbuka berupa aksi demonstrasi dan penandatanganan petisi, serta audiensi dengan pihak PPS Cilacap dan DPRD Kab. Cilacap, sedangkan resistensi tertutup dilakukan para nelayan di PPS Cilacap dalam bentuk *ngrasani* atau gosip, melakukan pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh para nelayan untuk membahas masalah biaya tambat labuh kapal, serta penarikan rasa hormat nelayan kepada pemerintah karena keluhan atau aspirasi masyarakat terkesan hanya ditampung saja.

Dampak gosip dapat menjadi faktor yang memperburuk resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Gosip memiliki potensi untuk memperkuat persepsi negatif terhadap kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Dalam konteks ini, gosip mungkin menyebar tentang kemungkinan adanya motif tersembunyi dari pemerintah atau pelabuhan dalam menerapkan kebijakan biaya tambat labuh kapal. Misalnya, nelayan

dapat menerima informasi yang salah atau dilebih-lebihkan tentang bagaimana kebijakan tersebut akan merugikan mereka secara finansial atau bagaimana kebijakan tersebut diduga sebagai bentuk eksploitasi terhadap mereka.

Dampak negatif dari gosip ini dapat memperkuat sentimen negatif nelayan terhadap kebijakan, bahkan tanpa adanya bukti yang jelas atau pemahaman yang utuh tentang konteks kebijakan tersebut. Selain itu, gosip juga dapat mengganggu proses komunikasi yang sehat antara pemerintah, pelabuhan, dan nelayan, karena menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan antarpihak.

Dalam konteks resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, gosip mungkin berperan dalam meningkatkan intensitas perlawanan dan mempersulit pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat memperumit upaya pembuat kebijakan dan pelabuhan untuk menjelaskan niat baik dan tujuan dari kebijakan tersebut kepada para nelayan, serta memperburuk ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah, pelabuhan, dan masyarakat untuk mengakui potensi dampak negatif dari gosip dan bekerja sama untuk mengatasi informasi yang tidak benar atau yang merugikan. Komunikasi terbuka, transparan, dan terus-menerus antara semua pihak yang terlibat dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketegangan, serta membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. penarikan rasa hormat kepada pemerintah

B. Saran

1. Saran Akademis

Peneliti berharap agar penelitian (skripsi) ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta mahasiswa FISIP lainnya dalam melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berharap ada penelitian lain terkait dengan respon KKP dan PPS Cilacap terhadap resistensi nelayan terhadap kebijakan

biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, sehingga dapat diperoleh kejelasan atas resistensi yang dilakukan oleh para nelayan di Kab. Cilacap.

2. Saran Praktis

Peneliti, selain memberikan saran-saran yang bersifat akademis, juga memberikan beberapa saran praktis, sebagai berikut :

- a. Pemerintah, dalam hal ini KKP dalam menetapkan kebijakan biaya tambat labuh kapal di pelabuhan perikanan, sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan, dalam hal ini utamanya para nelayan. Pemerintah hendaknya mendengarkan segala aspirasi atau keluhan para nelayan terkait dengan kebijakan tersebut agar kedepan resistensi tidak terjadi kembali. PPS Cilacap selaku pelaksana kebijakan tersebut juga harus lebih aktif melakukan sosialisasi kepada nelayan, agar para nelayan memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Peneliti juga berharap agar HNSI Kab. Cilacap agar lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mengadvokasi kebijakan biaya tambat labuh kapal, hal ini penting agar kedepan nelayan memiliki lingkungan kerja yang baik; dan
- b. Belum adanya titik temu antara pemerintah dengan para nelayan terkait dengan kebijakan biaya tambat labuh kapal di PPS Cilacap, tentu kedepan membuka aksi-aksi perlawanan dari para nelayan. Peneliti berharap agar para nelayan dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhannya, mengutamakan cara-cara bermusyawarah, dan tidak melakukan aksi-aksi demonstrasi yang dapat berpotensi terjadinya tindak pidana, seperti kekerasan atau pengrusakan terhadap fasilitas umum.

Daftar Pustaka

- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afandi, A. Y., Ghazal, S. A., & Sobarna, A. 2022. “Implikasi Pendidikan QS. Ali Imran Ayat 104 tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap Akhlak”. *Bandung Conference Series : Islamic Education*, 2 (2), 831-838. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4629>.
- Alfa. A., & Kinanda, R. 2019. “Kajian Literatur Resistensi dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan serta Usulan Strategi dalam Menghadapi Resistensi Kebijakan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”. *Selodang Mayang : Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5 (3), 187-197. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v5i3.138>.
- Ali, F. 2023. “Representasi Al-Quran Surah Al-Imran : 104, Analisis atas Nilai Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Konten Video Tiktok (VT) Dakwah Muezza”. *Alif Lam : Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3 (2), 1-13. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.429>.
- Alkhudri, A. T., Dharmawan, A. H., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. P. 2018. “Metamorfosis Gerakan Sosial di Banten ; dri Romantisme Identitas ke Isu Agraria Lingkungan”. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6 (1), 24-31. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i1.21204>.
- Amelia, L. N, dan Prasetyo, K. B. 2023. “Etika Subsistensi sebagai Strategi Survival Pembatik Rumahan di Desa Trusmi Kulon Kabupaten Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19”. *Solidarity*, 12 (1), 93-104. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarit>.
- Anam, K., Kolopaking, L. M., & Kinseng, R. A. 2020. “Efektivitas Sosial Media dalam Gerakan Sosial Penolakan Reklamasi Teluk Jakarta”. *Jurnal Sodality*, 8 (1), 64-81. <https://doi.org/10.22500/8202028955>.
- Arake, L. 2020. *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta : CV. Lintas Nalar.

- Ariadi, B. 2019. *Laporan Tahunan PPS Cilacap 2018*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Azmie, U. 2023. “Nelayan Cilacap Tolak Pemberlakuan PNBPN dan Protes Biaya Tambat Labuh di PPSC”, dalam <https://serayunews.com/nelayan-cilacap-tolak-pemberlakuan-pnbp-dan-protes-biaya-tambat-labuh-di-ppsc>, diakses pada 8 Februari 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. 2023. *Kabupaten Cilacap dalam Angka 2023*. Cilacap : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.
- Erlangga, R., Sukri., & Ariana. 2022. “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng PT. Royal Bengkalis Atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar. *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (1), 78-90. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1833>.
- Fitriani, N. N., Marwiyah, S., & Yudianto, E. 2023. “Pengaruh PP No.85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Jurnal Niara*, 15 (3), 500-506. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10722>.
- Fitrianita, E. 2019. Resistensi Nelayan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. *Skripsi*. Semarang : Unievrstas Diponegoro.
- Hikmatullah, I. 2020. Resiliensi Buruh Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- HNSI. 2023. “HNSI Desak Pemerintah Cabut PP No.85 Tahun 2021 : Merugikan Masyarakat Nelayan”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5749576/hnsi-desak-pemerintah-cabut-pp-no-85-tahun-2021-merugikan-masyarakat-nelayan>.
- Huda, M. S. 2020. Resistensi Terhadap Fikih Patriarki (Studi Bahthal Masa’il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur). *Disertasi*. Surabaya : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Imron, M. 2003. “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (1), 63-82. <https://jmb.lipi.go.id/jmb.article>.

- Irawan, E. Y., Gunawan, W., & Sulaeman, M. 2022. "Tahapan Gerakan Sosial Sidney Tarrow dalam Kasus Serikat Petani Piondo Sulawesi Tengah". *JAS : Jurnal Analisa Sosiologi*, 11 (1), 73-95. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/56361>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2023. *Profil PPS Cilacap 2023*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kusumah, W., Prananta, A. W., Rahmawati, A. D., & Budiyantri, S. 2022. "Strategi Adaptasi Nelayan Pada Pengembangan Wisata Pantai 9 di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep". *JSP : Jurnal Sosial Politika*, 3 (1), 30-40. <https://doi.org/10.54144/jsp.v3i1.49>.
- Murtianto, T. B. 2022. "Thomas Hobbes : Ketakutan Sebagai Dasar Terbentuknya Negara". *Jurnal Hukum Novum Argumentum*, 1 (1), 97-107. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/nea/article/view/4466>.
- Nawawi., Lasiyo., & Wahyono, S. B. 2016. "Resistensi Komunitas Bonokeling Terhadap Islam Puritan". *Ibda : Jurnal Kebudayaan Islam*, 14 (1), 90-113. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.2016.pp90-113>.
- Pathurrahman., Hadiyanor, E., Hairini, S. M., & Tabitha, T. 2022. "Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Nelayan Desa Tabanio Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan". *JPP : Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4 (2), 116-130. <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.6553>.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/ Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710.
- Rahmawati, R., & Firman. 2018. "Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme". *Aristo : Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 7 (4), 46-63. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1303/843>.

- Rofiqoh, I., & Zulhawati. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin. 2019. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Perairan Laut (Studi Relasi Kuasa Antar Kelompok Nelayan di Wilayah PLTU Pelabuhanratu)*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97555>.
- Rusmanto, J. 2017. *Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan*. Surabaya : Pustaka Saga.
- Scott, J. C. 1985. *Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven Connecticut : Yale University Press.
- , 1990. *Domination and the Arts of Resistance : Hidden Transcripts*. New Haven Connecticut : Yale University Press.
- Septyanto, M. A. 2023. Peran Friends of The Earth International (FOEI) dalam Strategi Advokasi pada Konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020. *Skripsi*. Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Srifariyati, A. S. N. 2019. "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58-59". *Jurnal Ilmiah Madaniyah*, 9 (1), 41-61. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79>.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, S. 2021. "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Padaelo". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18 (2), 134-147. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.164>.
- Tarrow, S. 2022. *Power in Movement*. Kingdom of England : Cambridge University Press.
- Tilly, C. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading Mass : Addison Wesley.
- Tokan, R. I. 2016. *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru, Dosen dan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Grasindo.

- Wahyuni, F. 2017. “Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung (Studi Dampak Sosial Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja pada Kasus Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8 (1), 89-103. <http://repository.lppm.unila.ac.id/40535/1/01%20evaluasi%20dampak%20kebijakan%20reklamasi%20pantai.pdf>.
- Wicaksono, W. M. 2023. “Nelayan Cilacap Unjuk Rasa Tolak PP No.85 Tahun 2021”, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/19/nelayan-cilacap-unjuk-rasa-tolak-pp-no-85-tahun-2021>, diakses pada 8 Februari 2024.
- Zainuddin, A. R., Sayogyo., & Joebhaar, M. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah : Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1

Foto Kegiatan Wawancara







Lampiran 2

Biografi Penulis



A. Identitas Diri

1. Nama : Noni Kensiwi
2. NIM : 2006016051
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/24 Agustus 2002
4. Alamat : Rt1/2 Desa Bulurejo, Ayah, Kebumen
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. HP : 081287445142
8. Email : nonikensiwi27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN BULUREJO
2. SMPN 1 AYAH
3. SMAS ISLAM ALKAHFI SOMALANGU KEBUMEN

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Maret 2024

Saya yang bersangkutan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Noni Kensiwi', with a horizontal line extending to the right and the initials 'KVA' written below it.

Noni Kensiwi

2006016051